

Harian
JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

PEMBINA :
Letjend TNI (Purn) Dr. SUTIYOSO
Mayjen TNI (Purn) Dr. SAURIP KADI, S.E.,MM., MBA.
Pendiri, Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab :
TONI LIMBONG, SH.

REDAKSI:
Jl Komplek Depag Blok G2 No.83
RT012 RW003 Kelurahan Kedaung,
Kaliangke, Jakarta Barat,
Telp: (021) 23095745
Email: harianjayapos@yahoo.co.id

TERVERIFIKASI DEWAN PERS

SENIN: EDISI 865 TAHUN XX, 9 - 15 NOVEMBER 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

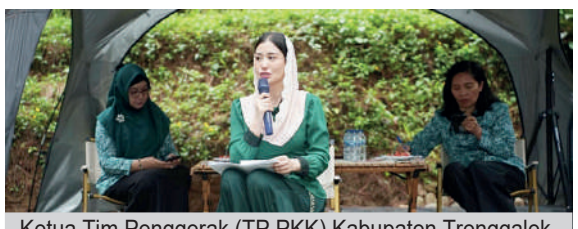
Dorong Kesadaran Kolektif Kelola Sampah, Ketua TP PKK Trenggalek Gagas GCC

Trenggalek, Jaya Pos

Untuk mendorong kesadaran masyarakat mengelola sampah secara baik, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini menggagas Green Community Championship (GCC).

Melalui program ini, Ketua TP PKK yang juga anggota DPR-RI Dapil VII Jatim tersebut ingin permasalahan tentang sampah bisa tertangani lebih kom-

▸▸ Halaman 5



Ketua Tim Penggerak (TP PKK) Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini (JP/HWi)

Polres Langkat Edukasi Masyarakat Pengguna Jalan, Dukung Operasi Patuh Toba 2026

Langkat, Jaya Pos

Polres Langkat terus menggencarkan edukasi dan imbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat dalam rangka Operasi Patuh Toba 2026 yang berlangsung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Kegiatan tersebut menyasar pedagang, pembeli, Hingga pengguna jalan.

Upaya ini dilakukan melalui pendekatan humanis

▸▸ Halaman 5



Operasi Patuh Toba 2026, meningkatkan kesadaran masyarakat dan mematuhi peraturan lalu lintas, (foto/ Fatimah)

DUGAAN SKANDAL PENYADAPAN PRESIDEN, UJIAN PROFESIONALITAS DAN TRANSPARANSI POLRI



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat diangkat sejumlah personel Brimob di Lapangan Mako Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026). (foto: ist)

> Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, bahkan dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, memicu sorotan terhadap profesionalitas dan integritas kepolisian. Kasus ini bukan sekadar menyangkut pelanggaran privasi, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam kepercayaan publik.

Jakarta, Jaya Pos

Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, kembali menjadi sorotan publik. Kasus ini bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi, tetapi juga menyangkut profesionalitas, penyalahgunaan kewenangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Penyadapan sejatinya merupakan instrumen penegakan hukum yang penggunaannya dibatasi oleh undang-undang. Namun, jika kewenangan tersebut digunakan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, tindakan itu berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Terlebih, dugaan penyadapan disebut terjadi ketika Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri pada 2025. Jika

▸▸ Halaman 5

Herdiat Targetkan Ciamis Kembali Tembus 10 Besar

Ciamis, Jaya Pos

Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunarya menargetkan kontingen Kabupaten Ciamis mampu kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menembus 10 besar pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat Tahun 2026.

Target tersebut disampaikan Herdiat saat mengukuhkan dan melepas Kontingen Kabupaten Ciamis untuk berlaga di Porprov XV Jabar 2026, di Halaman Pendopo Gedung Negara Ciamis, Senin (2/11).

Herdiat mengakui, persiapan menghadapi Porprov tahun ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak boleh menyurutkan semangat para atlet untuk memberikan kemampuan terbaik demi mengharumkan nama Kabupaten Ciamis. “Meskipun saat ini segalanya minimalis, bukan berarti kita tidak punya keinginan. Paling tidak, kita bisa mempertahankan



Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengukuhkan dan melepas Kontingen Kabupaten Ciamis untuk berlaga di Porprov XV Jabar 2026, di Halaman Pendopo Gedung Negara Ciamis. (Foto:Mamay)

prestasi tahun sebelumnya, meskipun kemampuan keuangan kita terbatas,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, pada Porprov 2022 ketika Kabupaten Ciamis menjadi tuan rumah, kontingen Ciamis berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan menempati peringkat kesembilan dari seluruh peserta.

Saat itu, Ciamis berhasil mengumpulkan 99 medali, terdiri dari 35 medali emas, 29 medali perak, dan 35 medali perunggu. Capaian

▸▸ Halaman 5

PWI Half Marathon 2026 Jadi Rangkaian *Kick Off* HPN Lampung, PWI Pusat All Out Dukung

Jakarta, Jaya Pos

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ajang olahraga PWI Half Marathon 2026 sebagai rangkaian Kick Off Hari Pers Nasional (HPN) Lampung. Dukungan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Laporan Ketua Panitia bersama PWI Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat PWI Pusat pada Senin, 2 November 2026.

Ajang lari bergengsi ini rencananya akan diselenggarakan di Lapangan Saburai Enggal, Bandar Lampung, pada hari Minggu, 29 November 2026, mulai pukul 05.00 WIB. Acara ini turut didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia serta berbagai sponsor terkemuka.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam rapat tersebut menyatakan apresiasi dan dukungan penuh Pengurus Pusat terhadap inisiatif PWI Lampung dan panitia pelaksana.

“Kami di PWI Pusat mendukung penuh inisiatif dan kesiapan PWI Lampung serta Panitia Pelaksana dalam menggelar PWI Half Marathon 2026. Ini merupakan langkah konkret insan pers dalam membangkitkan semangat berolahraga sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat luas,”

▸▸ Halaman 5



Rapat Laporan Ketua Panitia bersama PWI Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat PWI Pusat pada Senin, 2 November 2026.(Foto Humas PWI Pusat)



Baru dibangun, tembok penahan dan aspal sudah bergelombang. (Foto: ist)

Proyek Jalan Rp1,56 Miliar di Tandam Hilir II Rusak

Tembok Penahan Ambruk! Bupati, Dinas PU dan APH Didesak Turun Tangan

Deli Serdang, Jaya Pos

Proyek pembangunan jalan di Desa Tandam Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang menelan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.563.916.000, kini menjadi sorotan. Pasalnya, tembok penahan jalan dilaporkan ambruk, sementara permukaan aspal terlihat bergelombang dan berlubang.

Kerusakan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi, pelaksanaan pekerjaan, hingga efektivitas pengawasan proyek. Bagaimana mungkin proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah yang dikerjakan dalam rentang Juni hingga Oktober 2026 sudah memperlihatkan kerusakan?

Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai kerusakan biasa. Sebab, setiap rupiah yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun kualitas hasil pembangunan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jaya Pos, proyek tersebut dilaksanakan oleh PT Aspar Sarana

▸▸ Halaman 5

Diduga Gelapkan Uang Rp5 Miliar, Fawas Salim Diseret ke Pengadilan Negeri Bandung

Bandung, Jaya Pos

Fawas Salim bin Salim menjalani sidang perdana kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (2/11/2026). Dalam perkara ini, jaksa menyebut Fawas belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp5 miliar dari total Rp8,5 miliar yang diterimanya pada 2018.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahayudin mengungkapkan, perkara tersebut bermula pada 28 September 2018. Saat itu, Fawas bersama istrinya mendatangi rumah Murad Alkateri di Jalan Terusan Galunggung, Kota Bandung.

Kepada Murad, Fawas mengaku membutuhkan dana Rp8,5 miliar untuk merenovasi Cafe Equator dan menyelesaikan persoalan keuangan keluarga. Salah satunya untuk memberikan kompensasi kepada saudara-saudaranya terkait rencana pengambilalihan rumah peninggalan ibunya di kawasan Tamansari, Bandung.

Untuk meyakinkan Murad, Fawas berjanji mengembalikan seluruh uang tersebut pada 20 Desember 2018. Pengembalian dijanjikan setelah rumah miliknya di Kota Bandung terjual.

Sebagai jaminan, Fawas menyerahkan dua sertifikat tanah, yakni SHM Nomor 02944 dan SHM Nomor 165. Kedua sertifikat tersebut masing-masing berkaitan dengan objek tanah di Kabupaten Sumedang dan Majalengka.



Terdakwa Fawas sedang mendengarkan dakwaan dari JPU di ruang sidang anak Senin(2/11/2026).(Foto Ist)

Karena menganggap Fawas sebagai bagian dari keluarga, Murad kemudian menyetujui permintaan tersebut. Uang Rp8,5 miliar ditransfer dari rekening Bank Mandiri ke rekening Bank BCA atas nama Fawas Salim.

Namun, hingga batas waktu yang disepakati, Fawas tidak mengembalikan seluruh pinjaman. Terdakwa hanya membayar Rp3,5 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp5 miliar belum dilunasi.

Dalam surat dakwaan, jaksa juga mengungkapkan Fawas sempat menyerahkan dua lembar cek kepada Murad pada 10 dan 11 November 2021. Masing-masing cek bernilai Rp900 juta dan Rp300 juta. **(Hendri)**

Cegah Penyalahgunaan Narkotika di Institusi Kepolisian

Polres Ciamis Larang Anggota Polisi Gunakan Vape



Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, menegaskan kepada para awak media tentang pelarangan seluruh anggota Polres Ciamis untuk tidak menggunakan rokok elektrik (vape). (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Polres Ciamis secara resmi melarang seluruh anggota di lingkungan kerja maupun luar kedinasan untuk menggunakan rokok elektrik (vape). Hal tersebut adalah langkah tegas dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan internal institusi kepolisian.

Aturan ketat ini diberlakukan menindaklanjuti surat edaran dari Kapolri. Tidak hanya berlaku bagi personel kepolisian, larangan penggunaan vape tersebut juga menyasar para tamu yang berkunjung ke lingkungan kantor Polres Ciamis. ”Ya untuk larangan anggota Polri menggunakan vape ini sudah dilaksanakannya mulai dari tanggal 30 Oktober kemarin,” kata Kapolres Ciamis, AKBP Eko Iskandar, saat dikonfirmasi para awak media di Mapolres Ciamis, Rabu (4/11).

Menurutnya, gagasan ini sebenarnya sudah menjadi pembahasan sejak Kapolri menjabat sebagai Kabareskrim. Langkah preventif ini juga telah lebih dulu diterapkan di beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Thailand.

Kebijakan tersebut diambil bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan, penggunaan vape dinilai memiliki potensi celah kerawanan yang tinggi terhadap peredaran gelap narkotika melalui media cair (liquid).

Saat ini, lanjutnya, cairan vape kerap disalahgunakan dengan mencampurkan berbagai jenis zat terlarang seperti etomidat, ketamin, hingga sabu, yang sangat sulit dibedakan secara kasat mata. Potensi ini dinilai sangat mengkhawatirkan dan mengancam masa depan anak-anak remaja.

”Inilah yang digagas oleh Bapak Kapolri. Kita memberikan contoh kepada masyarakat untuk kita sebagai anggota kepolisian tidak menggunakan vape. Tujuannya untuk mencegah celah-celah penyalahgunaan narkoba ini supaya tidak terjadi,” tegasnya.

Polres Ciamis tidak main-main dalam menegakkan aturan larangan penggunaan vape ini. Pihaknya memastikan akan langsung melakukan penertiban. Langkah ini berupa sweeping serta sosialisasi masif kepada seluruh anggota lewat apel pagi dan jajaran pejabat fungsional.

AKBP Eko Iskandar menyebut, bagi anggota yang kedapatan melanggar surat edaran, sanksi disiplin menanti. Bahkan, sanksi yang diterapkan bisa berlipat ganda dan mengarah pada ranah pidana. Sanksi tersebut jika dalam pemeriksaan anggota Polres Ciamis terbukti vape yang digunakan mengandung zat narkotika.

”Sanksi disiplin ada jelas pasti, apabila ada anggota Polri yang melanggar terhadap surat edaran ini kita akan kenakan sanksi disiplin. Apabila nanti ditemukan vape ini mengandung narkoba, ini tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan sanksi pidana terhadap anggota,” pungkasnya. **(Mamay)**

Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2026

Pemkab Ciamis Tekankan Netralitas dan Kondusivitas Jelang Pemungutan Suara

Ciamis, Jaya Pos

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengajak seluruh elemen yang terlibat untuk bersama-sama menjaga kedamaian, menjunjung tinggi netralitas, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Deklarasi Damai Pilkades Serentak sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa.

Deklarasi Damai tersebut menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kabupaten Ciamis Bulan November 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Ciamis, Kamis (5/11).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi seluruh pihak sekaligus memastikan setiap tahapan Pilkades Serentak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam arahannya, Andang menegaskan bahwa keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari terlaksananya proses pemungutan suara, tetapi juga dari terjaganya keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat selama seluruh tahapan berlangsung.

Ia mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, serta seluruh panitia Pilkades agar senantiasa menjaga netralitas dan memahami regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan.

Apabila ditemukan persoalan dalam setiap tahapan, seluruh pihak diminta mengedepankan musyawarah dan menyelesaikannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. “Seluruh pihak harus bersama-sama menjaga kondusivitas selama pelaksanaan seluruh tahapan Pilkades Serentak Tahun 2026. Jangan sampai perbedaan pilihan menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.



Sekda Ciamis, Andang Firman T memperlihatkan perjanjian kerja sama antara sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ciamis dengan Kejaksaan Negeri Ciamis dan Pengadilan Agama Ciamis.. (Foto:Mamay)

Berdasarkan laporan perkembangan tahapan hingga 5 November 2026, sebanyak 40 desa di Kabupaten Ciamis akan melaksanakan Pilkades Serentak. Seluruh desa tersebut telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 16 Oktober 2026.

Dalam tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa, sebanyak 33 desa telah memiliki bakal calon dengan jumlah minimal dua orang dan maksimal lima orang.

Sementara itu, masih terdapat lima desa yang baru memiliki satu bakal calon, yakni Desa Nagarapageuh dan Kertajaya di Kecamatan Panawangan, Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara, Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar, serta Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas.

Adapun dua desa lainnya, yaitu Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis dan Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya, dijadwalkan melaksanakan seleksi pada 12 November 2026. Seleksi diperlukan karena jumlah pendaftar bakal calon di kedua desa tersebut mencapai tujuh orang sehingga harus ditetapkan lima bakal calon untuk melanjutkan tahapan berikutnya.

Tahapan selanjutnya akan memasuki penetapan calon kepala desa, pengundian dan penetapan nomor urut, serta penjelasan tata cara kampanye pada 1 Desember 2026. Masa kampanye dijadwalkan berlangsung pada 4, 7, dan 8 Desember 2026, dilanjutkan masa tenang pada 9 hingga 11 Desember 2026. Sementara pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan pada Minggu, 13 Desember 2026.

Menariknya, Pilkades Serentak tahun ini akan menerapkan sistem digital atau elektronik yang tersebar di 176 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 TPS mendapatkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan 106 TPS lainnya dibiayai melalui APBD Kabupaten Ciamis.

Andang menekankan bahwa penerapan sistem digital membutuhkan kesiapan yang matang, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung.

Ia meminta Panitia Pilkades Kabupaten bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada pemerintah kecamatan, BPD, panitia tingkat desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga masyarakat.

Sosialisasi tersebut juga harus disertai simulasi atau uji coba langsung penggunaan perangkat digital agar masyarakat dan seluruh petugas memahami mekanisme pemungutan suara elektronik.

Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ciamis dengan Kejaksaan Negeri Ciamis dan Pengadilan Agama Ciamis.

Andang menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk penguatan sinergi antarlembaga dalam menjamin kepastian dan kepatuhan hukum, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya penandatanganan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui implementasi nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi. “Yang paling penting dari perjanjian kerja sama ini bukan acara seremoninya, tetapi implementasinya. Pelaksanaan tugas harus menjadi lebih baik dan manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat dibandingkan sebelum adanya perjanjian kerja sama,” tegas Andang.

Melalui rangkaian agenda tersebut, Pemkab Ciamis berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, baik dalam menyukseskan Pilkades Serentak 2026, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, mempercepat layanan perlindungan sosial, maupun memperkuat kepastian hukum.

Khusus pelaksanaan Pilkades Serentak, deklarasi damai diharapkan menjadi komitmen bersama seluruh pihak untuk mengedepankan demokrasi yang tertib, jujur, dan damai, sehingga perbedaan pilihan tidak mengurangi persaudaraan serta persatuan masyarakat Kabupaten Ciamis. **(Mamay)**

Hadirkan Konsep Pesantren

Lapas Ciamis Gandeng Kemenag dan Manarul Huda

Ciamis, Jaya Pos

Upaya dalam memberikan bimbingan mental dan kepribadian bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP), terus digencarkan Lapas Kelas IIB Ciamis. Salah satunya, Lapas Ciamis ini menghadirkan konsep pesantren.

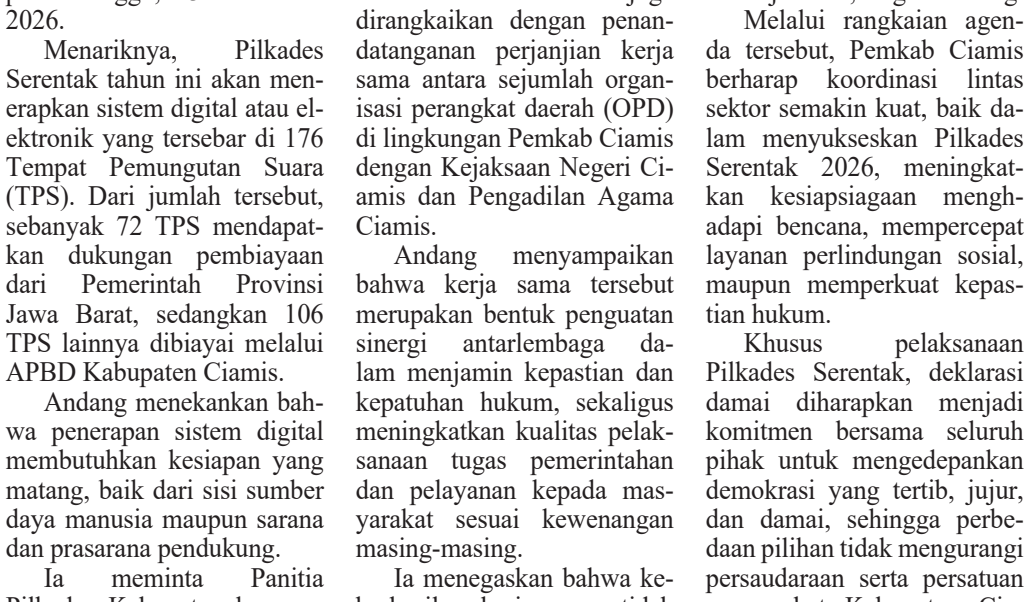
Langkah nyata tersebut direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau kerja sama bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Ciamis dan Manarul Huda Kecamatan Rancah. Kerja sama tersebut bertempat di aula Lapas Kelas IIB Ciamis, Rabu (4/11).

Momen penting ini juga bertepatan dengan peluncuran program inovatif bertajuk Si PASTI. Inovasi ini merupakan akronim dari optimalisasi pengelolaan, serta penilaian pembinaan pada kepribadian spiritual yang terintegrasi. Program tersebut merupakan gagasan dari Aji Krisnanto, yang merupakan Kasi Binadik serta Giatja Lapas IIB Ciamis.

Hadirnya inovasi konsep pesantren ini, diharapkan mampu membuat seluruh rangkaian kegiatan pembinaan kerohanian di dalam Lapas Ciamis berjalan dengan jauh lebih sistematis, terpadu, dan terukur.

Kepala Lapas Kelas IIB Ciamis, Supriyanto, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kemenag Ciamis serta Manarul Huda atas kerja sama yang terjalin. ”Kolaborasi ini menjadi batu loncatan yang sangat penting. Terutama dalam mewujudkan visi kami, untuk menyulap suasana Lapas Ciamis agar menyerupai lingkungan pondok pesantren,” ungkap Supriyanto.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sinergi ini bertujuan untuk mengalihkan fungsi lapas menjadi tempat introspeksi dan pengembangan diri yang konstruktif. Harapan dari konsep pesantren ini, WBP Lapas Ciamis yang kini berstatus sebagai santri lapas dapat kembali berbaur di tengah masyarakat. “Sehingga mereka membawa perubahan positif. Perubahan itu mulai dari akhlak yang mulia, kedisiplinan tinggi, hingga bekal keimanan yang kokoh setelah mereka merdeka nanti,” pungkasnya. **(Mamay)**



Penandatanganan kerja sama Lapas Ciamis bersama Kantor Kemenag Ciamis dan Manarul Huda, di aula Lapas Kelas IIB Ciamis. (Foto:Mamay)

Polres Ciamis Gandeng Disnaker Hadirkan Program Polisi Peduli Pengangguran



Kadisnaker Ciamis, Dase Fadlil Yusdy Mubarak menyambut Kapolres Ciamis, AKBP Eko Iskandar sewaktu menyambangi Disnaker Ciamis dalam rangka program Poliran. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis terus mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal melalui penguatan sinergi dengan berbagai pihak. Salah satu langkah yang mendapat dukungan adalah program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) yang digagas jajaran kepolisian untuk membantu membuka peluang kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Kabupaten Ciamis.

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis, Hendri Ridwansyah, ST., M.M., saat mendampingi Wakapolres Ciamis, Kompol Sujana, S.Pd., melakukan kunjungan ke PT Shinli Cahaya Matahari di Jalan Otista, Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Kamis. (5/11).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan memperkuat kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, serta dunia usaha. Melalui langkah ini, diharapkan tercipta hubungan yang lebih baik dalam mendukung ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya warga Kabupaten Ciamis.

Hendri menyampaikan apresiasi atas inisiatif kepolisian melalui program Poliran. Menurutnya, persoalan pengangguran dan ketenagakerjaan membutuhkan keterlibatan banyak pihak sehingga tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. “Kami dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis sangat mengapresiasi adanya program dari pihak kepolisian, yaitu Poliren. Karena kami di Disnaker sangat memerlukan peran aktif dari seluruh stakeholder, termasuk dari pihak kepolisian,” ungkap Hendri.

Hendri menjelaskan, keberhasilan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja memerlukan dukungan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, kepolisian hingga perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Ciamis.

Menurutnya, perusahaan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu penyedia lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan perlu terus dibangun agar kebutuhan tenaga kerja dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia yang tersedia di daerah.

Hendri menilai, keberadaan program Poliran dapat membantu Dinas Ketenagakerjaan memperluas jaringan komunikasi dengan dunia usaha. Dengan adanya keterlibatan kepolisian, upaya mempertemukan perusahaan yang membutuhkan pekerja dengan masyarakat pencari kerja diharapkan dapat berjalan lebih optimal. “Kami sangat terbantu dengan adanya program ini. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, kami bisa lebih memaksimalkan penyerapan tenaga kerja sehingga masyarakat Ciamis memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Ciamis,” jelasnya.

Hendri berharap, Poliran tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu berkembang menjadi sarana komunikasi yang memberikan manfaat nyata. Terutama dalam menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan kesempatan untuk bekerja.

Selain membuka peluang kerja, keberadaan perusahaan di Kabupaten Ciamis juga dinilai memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah. Aktivitas dunia usaha dapat mendorong perputaran ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila didukung dengan penyerapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar.

Karena itu, Disnaker berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Ciamis dapat memberikan perhatian terhadap potensi tenaga kerja lokal. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, memperoleh penghasilan, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. “Harapan kami, melalui sinergi seperti ini, semakin banyak masyarakat Kabupaten Ciamis yang bisa terserap bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah sendiri. Dengan begitu, ke depan angka pengangguran di Kabupaten Ciamis dapat terus dikurangi,” harap Hendri.

Melalui kolaborasi program Poliran tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Ciamis berharap semakin terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Kerja sama lintas sektor ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis.

Sementara itu Kapolres Ciamis, AKBP Eko Iskandar mengatakan bahwa program Polisi Peduli Pengangguran ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Kapolri yang mendorong kepedulian institusi Polri terhadap dinamika dan persoalan sosial di tengah masyarakat. “Peran kepolisian tidak terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), melainkan juga berkontribusi dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga. Melalui program Polisi Peduli Pengangguran ini, Polres Ciamis bersama Disnaker ingin memperluas akses informasi mengenai pelatihan keterampilan dan peluang kerja. Sinergi antarlembaga ini penting agar program peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat dapat menjangkau warga yang membutuhkan,” kata Kapolres Ciamis, Kamis (29/10).

Ia menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Ciamis semakin meningkat, sehingga masyarakat memiliki kesiapan yang matang dan kemandirian ekonomi saat memasuki dunia kerja.

(Mamay)

BULOG Ciamis Bentuk Satgas Khusus Untuk Mencegah Penyalahgunaan Beras SPHP

Ciamis, Jaya Pos

Perum BULOG langsung mengambil sikap tegas dan terukur dalam merespons indikasi penyimpangan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang melibatkan oknum mitra di kawasan Matraman serta Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Demi menjaga marwah dan integritas penugasan dari negara, BULOG Ciamis langsung menggalakkan penertiban, memperketat kontrol, serta mengevaluasi total alur distribusi beras SPHP agar program stabilisasi harga ini benar-ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Komitmen tinggi tersebut diwujudkan lewat pengawasan internal yang lebih ketat serta peninjauan ulang terhadap mata rantai penyaluran, terutama pada titik-titik yang rentan terhadap penyelewengan.

Langkah taktis ini diambil sebagai bagian dari pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh yang selalu berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Guna memperkokoh lini pengendalian di lapangan, BULOG Ciamis resmi mendirikan Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).



Satgas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ketika sidak ke salah satu pasar tradisioanl di wilayah Kabupaten Ciamis. (Foto:Mamay)

Kehadiran satgas ini merefleksikan keseriusan perusahaan dalam menciptakan sistem pengawasan yang berlapis, terpadu, dan berkesinambungan di seluruh area kerja. Tugas utama Satgas Khusus ini meliputi pengawalan jalur distribusi, peninjauan tingkat kepatuhan mitra, dan pengujian agar setiap kilogram beras pemerintah disalurkan sesuai regulasi sehingga potensi kecurangan bisa ditekan sejak dini.

Fokus pemantauan ini juga diarahkan secara khusus kepada jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) Binaan di bawah naungan Kantor Cabang Ciamis.

Pemimpin Perum BULOG Kancab Ciamis, Johan Wahyudi, menggarisbawahi bahwa peningkatan pengawasan merupakan pilar krusial untuk merawat kepercayaan publik sekaligus memastikan para mitra memegang teguh komitmen dan tanggung jawabnya. “Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” ujar Johan, Jum’at, (30/10).

Johan juga menambahkan, seluruh jajaran internal BULOG di wilayah kerjanya terus diinstruksikan untuk siaga mengawasi distribusi agar program SPHP berjalan mulus, akurat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan warga.

CariInfo Dinas Fokus pengawasan ini turut menyasar penataan ulang serta evaluasi berkala terhadap jaringan mitra, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi garda terdepan penyampaian beras SPHP ke tangan konsumen.

BULOG secara tegas mengingatkan seluruh mitra agar patuh terhadap koridor aturan main, mulai dari mekanisme distribusi, batasan harga jual, hingga larangan keras mempermainkan komoditas subsidi pemerintah ini. Lewat pengawasan yang semakin intensif dan berlapis, BULOG optimis rantai pasok beras SPHP bakal semakin bersih, transparan, dan akurat, sekaligus meminimalisir celah pelanggaran di tiap lini.

Di samping itu, BULOG memandang langkah pembenahan ini sebagai strategi esensial untuk mengamankan efektivitas program SPHP yang memegang peran vital dalam mengendalikan ketersediaan serta harga beras nasional.

BULOG bertekad untuk terus menuntaskan penugasan pemerintah dengan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, pertanggungjawaban publik, serta keberpihakan kepada masyarakat. CariInfo Dinas Di sisi lain, perusahaan juga mendukung penuh proses penegakan hukum yang tengah berjalan oleh instansi berwenang, serta siap kooperatif memberikan data yang dibutuhkan demi menuntaskan dugaan pelanggaran secara objektif dan tuntas. **(Mamay)**

Gelar Apel Gabungan Kesiapsiagaan Bencana, Ini Kata Wakapolres Trenggalek

Trenggalek, Jaya Pos

Antisipasi dampak musim penghujan, Polres Trenggalek menggandeng stakeholder terkait menggelar apel gabungan. Mengambil tempat di halaman Mapolres Trenggalek, kegiatan tersebut menjadi penanda kesiapsiagaan wilayah dalam menghadapi bencana khususnya hidrometeoroligi.

Agenda yang diikuti oleh personel dari unsur TNI, Polri, Satpol PP Damkar, Dishub, BPBD, Tagana, Basarnah hingga Dinkes dan PMI dipimpin langsung Wakapolres Trenggalek, Kompol Herlinarto pada Kamis 5 November 2026.

“Apel gelar pasukan ini digelar dalam rangka memastikan kesiapansiagaan seluruh personel, sarana-prasarana, peralatan serta mekanisme, koordinasi,” sebutnya.



Wakapolres Trenggalek, Kompol Herlinarto melakukan pengecekan sarana prasarana penanggulangan bencana.(JP/HWi)

Sehingga, lanjut Wakapolres, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar maksimal.

Mengingat, sebagaimana informasi dari BMKG bahwa musim hujan tahun 2026 sampai dengan tahun 2027 diperkirakan datang lebih lambat dari yang seharusnya.

Itu mengindikasikan, berbagai kemungkinan sangat potensial terjadi. Termasuk, ancaman cuaca ekstrem di berbagai titik di Jawa Timur maupun Bumi Menak Sopal.

“Untuk itu, negara harus hadir ditengah masyarakat. Sebagai representasi negara, harus mampu menanggulangi sekaligus meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana alam yang akan terjadi,” jelas Kompol Herlinarto.

Ditambahkan oleh dia, guna menekan jumlah korban selayaknya terbangun kerjasama yang baik. Semua unsur harus bersinergi maupun berkolaborasi demi tugas kemanusiaan ini.

Tanggung jawab dimaksud hanya dapat terwujud ketika segala sesuatunya sudah dipersiapkan secara matang.

“Segala sesuatunya harus disiapkan, kemudian tidak boleh ‘underestimate’. Tetap waspada dan siaga menghadapi berbagai hal,” pesannya.

Tidak lupa, segera dilakukan kajian serta pemetaan atas wilayah-wilayah rawan bencana. Memperkuat koordinasi dan jalur komunikasi antar instansi, membentuk posko kesiapsiagaan pada lokasi yang ditentukan. Sehingga setiap informasi atau laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Disamping itu, seluruh personel yang dilibatkan harus dalam kondisi prima serta dilengkapi alat pelindung diri. Karena keselamatan petugas juga menjadi prioritas dan sama pentingnya.

“Tanggung jawab kemanusiaan ini merupakan tugas mulia dan penuh dengan kehormatan. Kepada rekan-rekan semuanya agar melakukan tugas dengan tulus, ikhlas. Niatkan sebagai ladang ibadah untuk memberikan pertolongan kepada sesama,” pesan Wakapolres.

Usai apel, di laksanakan pengecekan personel, sarana prasarana pendukung baik kendaraan kebencanaan maupun peralatan penunjang lainnya seperti perahu karet, pelampung, gergaji mesin hingga cangkul dan peralatan lainnya. **(HWi)**

Diskominfo Ciamis Dorong Seluruh ASN Untuk Menggunakan IKD

Ciamis, Jaya Pos

Penguatan infrastruktur jaringan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif dan terintegrasi. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan TIK dan Evaluasi Jaringan Intra Pemerintah Tahun 2026.


Kadiskominfo Kabupaten Ciamis, Enda Hidayat membuka kegiatan Bimtek Pemanfaatan TIK dan Evaluasi Jaringan Intra Pemerintah Tahun 2026. (Foto:Mamay)

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yakni secara langsung dari Kantor Diskominfo Kabupaten Ciamis dan daring melalui Zoom Meeting, Kamis (29/10), dengan peserta dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan dan UPTD se-Kabupaten Ciamis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, Enda Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan bimtek yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas infrastruktur digital sekaligus memperkuat kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Menurutnya, evaluasi jaringan intra pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pertukaran informasi dan data antarperangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. “Hal yang perlu kita soroti saat ini adalah bagaimana kondisi infrastruktur digital di Kabupaten Ciamis. Transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan masyarakat dan bagaimana kita mengelola data agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Enda menjelaskan, selain penguatan infrastruktur jaringan, terdapat aspek lain yang perlu mendapat perhatian bersama, di antaranya kesiapan masyarakat dalam beralih dari layanan konvensional menuju layanan digital serta peningkatan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Ia menyebutkan bahwa capaian penggunaan IKD di Kabupaten Ciamis masih berada di bawah 10 persen. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu ditindaklanjuti melalui sosialisasi dan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah.

Oleh karena itu, Enda mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menggunakan IKD dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.

Selain itu, Enda menekankan pentingnya pengelolaan dan integrasi data yang dihasilkan oleh masing-masing OPD. Menurutnya, data yang dihimpun harus tersusun secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan serta mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Melalui Bimtek Evaluasi Jaringan Intra Pemerintah ini, Diskominfo Kabupaten Ciamis berharap seluruh SKPD dan kecamatan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya evaluasi jaringan, memperkuat koordinasi antarpengelola teknologi informasi, serta mendukung keterpaduan sistem dan data pemerintahan.

Dengan demikian, penguatan jaringan intra pemerintah diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang lebih terintegrasi, efektif, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. **(Mamay)**

Dandim Simalungun Sambut Kunjungan Silaturrahmi Kapolres Pematangsiantar

Simalungun, Jaya Pos

Komandan Kodim 0207/Simalungun Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, S.E., M.I.P. di dampingi Perwira Staf sambut kunjungan silaturahmi Kapolres Kota Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan, S.I.K., M.M. ke Koramil 08/Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Kamis (5/11/2026)

Menurut Letkol Inf Agus Muchtadi Rangkuti, S.E., M.I.P. , kunjungan sinergitas dan soliditas antara Kodim 0207/Simalungun dengan Polres Kota Pematangsiantar, yang selama ini telah berjalan dengan baik dan dapat terus dijaga serta ditingkatkan dalam mewujudkan stabilitas keamanan di wilayah, khususnya Kota Pematangsiantar.

"Kedatangan Kapolres Pematangsiantar beserta beberapa stafnya adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kegiatan ini juga sekaligus membangun sinergitas antara TNI-Polri demi menjaga



Komandan Kodim 0207 / Simalungun Sambut dengan Hangat Kapolres Pematang Siantar. (Foto/RD)

persatuan dan kesatuan guna menciptakan situasi Wilayah Kota Pematangsiantar yang aman, tertib dan kondusif," ungkap Dandim

Di harapkan kunjungan dan silaturahmi hari ini dapat berlanjut, yang mana nantinya, jajaran Kodim 0207/Simalungun dan Polres Pematangsiantar melaksanakan kegiatan bersama.

Sama halnya dengan Kapolres Pematangsiantar, AKBP Dhana Noer Kurniawan, S.I.K., M.M., juga menyampaikan terima kasih atas sambutan Dandim 0207/Simalungun beserta stafnya. Bahwa silaturahmi tersebut sebagai sarana membangun komunikasi yang baik dengan instansi terdekat yang ada.

""Semoga dengan terjalinnya silaturahmi dan komunikasi yang baik antara Polres Pematangsiantar dengan Kodim 0207/Simalungun, diharapkan dapat bekerjasama menciptakan situasi yang aman dan kondusif" kata Kapolres.

(R.d)

Cooling System di Desa Tanjung Mulia,

Kapolsek Hinai Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas dan Waspadai Banjir



Kapolsek Hinai ajak warga Desa Tanjung Mulia jaga keamanan dan ketertiban serta mewaspadai banjir. (Foto/ Fatimah)

Langkat, Jaya Pos

Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, Kapolsek Hinai IPTU Sihar M.T. Sihotang, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan sambang, silaturahmi, dan cooling system bersama tokoh masyarakat Dusun II, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan didampingi Wakapolsek Hinai IPTU Musa M. Situmorang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Quick Wins Kapolri melalui kegiatan "Kumpul Bersama Masyarakat" sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Kapolsek Hinai mengajak tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap aset-aset milik Pemerintah Desa Tanjung Mulia, seperti jembatan dan bangunan pemerintah, agar tetap terpelihara dan terhindar dari aksi pencurian maupun tindak pidana lainnya, termasuk pencurian buah kelapa sawit.

Selain menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, Kapolsek Hinai juga memberikan penyuluhan mengenai ketentuan KUHP dan KUHAP terbaru agar masyarakat semakin memahami aturan hukum serta dapat meningkatkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengingat saat ini memasuki musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, Kapolsek juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir. Hal tersebut menjadi perhatian mengingat pada tahun sebelumnya wilayah tersebut pernah mengalami banjir akibat luapan air dari aliran parit yang menggenangi permukiman warga.

Kapolsek Hinai menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan setiap informasi maupun permasalahan yang berpotensi mengganggu kamtibmas agar dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan tersebut, tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolsek Hinai beserta jajaran Polri atas kepedulian dan respons cepat dalam menanggapi berbagai persoalan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat.

Masyarakat juga menyambut baik kegiatan sambang dan silaturahmi tersebut karena dinilai menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, informasi, serta berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian kepolisian.

Melalui kegiatan ini, Polsek Hinai berharap sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

Polri hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun kedekatan, mendengarkan aspirasi, dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat. **(Fatimah)**

Gubernur Lampung Lantik M. Galang Putra Rahman Jadi Wakil Bupati Way Kanan

Bandar Lampung, Jaya Pos

Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan M. Galang Putra Rahman sebagai Wakil Bupati Way Kanan untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (30/10/2026).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3264 Tahun 2026 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Way Kanan untuk sisa masa jabatan 2025–2030.

Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Mirza itu mengucapkan selamat kepada M. Galang Putra Rahman. Dia mengingatkan bahwa jabatan Wakil Bupati merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Utamakan kepentingan masyarakat. Ukurannya sederhana, bagaimana masyarakat Way Kanan bisa merasakan manfaat dari kehadiran kita," ujar Mirza.

Gubernur juga menekankan pentingnya kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Keduanya diminta membangun komunikasi yang baik serta menyepakati pembagian tugas secara jelas sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepada Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, Mirza berpesan agar memberikan ruang dan kewenangan yang jelas kepada Wakil Bupati. Hal itu dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Masyarakat tidak butuh pemimpin yang jalan sendiri-sendiri. Masyarakat Way Kanan butuh pemimpin yang kompak dan bekerja dalam satu arah," tegasnya.

Selain kekompakan kepemimpinan, Gubernur menitipkan tiga tugas penting



M.Galang Putra Rahman Resmi Di Lantik Sebagai Wakil Bupati Way Kanan. (Humas Pemda)

kepada Wakil Bupati.

Pertama, membantu Bupati dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menerapkan sistem merit, menjaga netralitas, dan menegakkan disiplin. Kedua, menjaga integritas serta menjauhi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, aktif turun ke lapangan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat hingga tingkat kampung agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Dalam bidang pembangunan, Mirza meminta Pemerintah Kabupaten Way Kanan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta mendukung program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan penguatan ketahanan pangan.

Menurutnya, potensi pertanian dan perkebunan Way Kanan harus dikembangkan secara maksimal. Pengembangan tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga perlu diarahkan pada pengolahan hasil pertanian dan perkebunan agar memiliki nilai tambah.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat hingga tingkat kampung. Upaya ini juga perlu diselaraskan dengan Program Desaku Maju Pemerintah Provinsi Lampung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Mirza turut meminta agar perencanaan pembangunan Kabupaten Way Kanan sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Lampung. Keselarasan tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045, melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kehidupan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, dr. Sasa Chalim Galang Putra Rahman juga dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Way Kanan.

Gubernur berharap ketiga lembaga tersebut berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Peran itu dapat diwujudkan melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, enam Standar Pelayanan Minimal Posyandu, serta pelestarian dan pengembangan kerajinan daerah.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Way Kanan.

Hadir pula Ketua TP-PKK, Ketua Dekranasda, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Way Kanan, pejabat pimpinan tinggi pratama dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers.

Pelantikan M. Galang Putra Rahman diharapkan memperkuat kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan Kabupaten Way Kanan. Dengan sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan daerah dan pelayanan publik diharapkan berjalan lebih optimal demi mewujudkan Way Kanan yang mandiri dan sejahtera. **(Suhaili)**

Pemkab Deli Serdang Dukung 5 Ranperda, Atur Penanggulangan Bencana hingga Guru Sekolah Minggu

Deli Serdang, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menyatakan dukungan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Deli Serdang. Lima regulasi tersebut mengatur sejumlah bidang, mulai dari penanggulangan bencana, tuberkulosis (TBC), penataan desa dan kelurahan, hingga pembinaan keagamaan.

Dukungan itu disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, saat membacakan pendapat Bupati terhadap penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Kamis (5/11/2026).

Lom Lom mengatakan, Pemkab Deli Serdang menyambut baik kelima usulan tersebut. Menurutnya, keberadaan peraturan daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait Ranperda Penanggulangan Bencana, Pemkab menilai aturan tersebut penting untuk memperkuat upaya penanganan bencana sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

Regulasi itu diharapkan mengatur seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan setelah bencana.

Sementara Ranperda Penanggulangan TBC diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, dan penanganan penyakit tersebut secara berkelanjutan.

Lom Lom menegaskan, penanganan bencana dan TBC tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan koordinasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat agar upaya yang dilakukan berjalan efektif. "Penanggulangan bencana dan TBC membutuhkan komitmen serta keterlibatan seluruh pihak. Karena itu, diperlukan regulasi yang kuat agar setiap upaya yang dilakukan dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan memberikan perlindungan serta manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, Pemkab juga mendukung Ranperda tentang Pemekaran dan Penggabungan serta Perluasan Desa/ Kelurahan.

Menurut Lom Lom, regulasi tersebut perlu memuat ketentuan yang jelas menge-



Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, saat membacakan pendapat Bupati terhadap penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Kamis (5/11/2026).(Foto Rd)

nai persyaratan, tahapan, mekanisme, hingga pembagian kewenangan. Pengaturannya juga harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penataan wilayah desa dan kelurahan diharapkan dapat berlangsung lebih tertib serta memiliki kepastian hukum. Dua Ranperda lainnya berkaitan dengan pembinaan kehidupan beragama, yakni Maghrib Mengaji dan Guru Sekolah Minggu.

Ranperda Maghrib Mengaji diharapkan mendorong anak-anak dan generasi muda membiasakan diri membaca serta memahami Al-Qur'an. Program tersebut nantinya melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, dan pemerintah daerah. Sementara Ranperda Guru Sekolah Minggu diarahkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembinaan, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan guru sekolah minggu.

Guru sekolah minggu dinilai memiliki peran penting dalam mengenalkan ajaran agama Kristen kepada anak-anak dan generasi muda, sekaligus menanamkan nilai moral, etika, dan budi pekerti.

Lom Lom menekankan, pembinaan kehidupan beragama harus tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman. Pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian secara proporsional kepada seluruh umat beragama. "Kita ingin generasi muda Deli Serdang tumbuh menjadi generasi yang beriman, berkarakter, memiliki toleransi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kebersamaan," katanya.

Dia berharap kelima Ranperda tersebut dapat dibahas dan disempurnakan bersama DPRD sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Lom Lom berharap, setelah disahkan, seluruh regulasi tersebut tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

(Ramdani)

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

Dugaan Skandal Penyadapan Presiden ..... *Halaman 1*

dugaan tersebut terbukti, persoalannya menjadi serius karena menyangkut penggunaan kewenangan institusi penegak hukum di luar tujuan yang dibenarkan.

Kasus ini pun memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pengawasan internal Polri berjalan dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila penyadapan ilegal benar-benar terjadi?

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi ujian serius bagi profesionalitas Polri.

Menurut Bambang, kasus ini berpotensi semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Apalagi, dugaan penyadapan tidak hanya menyangkut pejabat negara, tetapi juga disebut berkaitan dengan jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil.

Ia mengingatkan, penyadapan tanpa dasar hukum dapat menimbulkan dampak lebih luas daripada sekadar pelanggaran privasi. Praktik tersebut berpotensi membuat masyarakat takut menyampaikan pendapat dan membatasi partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Bambang menjelaskan, penyalahgunaan penyadapan dapat mencerminkan pelanggaran berlapis, mulai dari etika profesi kepolisian hingga etika kelembagaan dan kenegaraan.

Menurutnya, Kapolri sebagai pemegang otoritas tertinggi di tubuh kepolisian seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas, mengingat Polri memiliki mandat melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan.

Kewenangan penyadapan yang diberikan negara untuk kepentingan penegakan hukum tidak boleh dialihkan menjadi alat pengawasan terhadap seseorang demi kepentingan di luar hukum.

Bambang menilai Polri tidak cukup hanya menyampaikan pernyataan bahwa kasus tersebut sedang ditangani. Institusi kepolisian harus membuktikan keseriusannya melalui proses hukum yang transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, keterbukaan menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tanpa transparansi, kasus ini berisiko hanya menjadi kontroversi sesaat tanpa menghasilkan perubahan mendasar.

Bambang mengingatkan, Polri pernah menghadapi sejumlah kasus besar yang mengguncang kepercayaan publik, antara lain pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo serta perkara narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa.

Menurutnya, berbagai kasus tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting agar pembenahan institusi tidak berhenti pada respons sementara.

"Momentumnya lewat karena tidak konsisten (berbenah). Kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan citra, tetapi reputasi melalui konsistensi," katanya.

Ia juga menekankan bahwa reformasi kepolisian harus menyentuh tata kelola kekuasaan hingga tingkat pimpinan tertinggi.

Reformasi tidak boleh hanya berfokus pada pelanggaran anggota di lapangan, seperti pungutan liar, kekerasan berlebihan, penyalahgunaan kewenangan penyidikan, dan buruknya pelayanan publik.

Pergantian Kapolri, mutasi pejabat, perubahan struktur organisasi, maupun peluncuran program baru tidak otomatis menjamin reformasi apabila sistem pengawasan dan pertanggungjawaban masih lemah. Salah satu aspek penting dalam pengusutan perkara ini adalah menelusuri rantai komando yang diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan.

Bambang mengingatkan, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar petugas teknis yang memasukkan nomor telepon ke dalam sistem. Aparat penegak hukum harus mengungkap siapa yang memberikan perintah, menyetujui tindakan, mengendalikan akses, hingga memanfaatkan informasi hasil penyadapan. "Jangan sampai pelaksana teknis menjadi pihak yang menanggung seluruh kesalahan, sementara pengendali kewenangan justru terlindungi," ujarnya.

Selain itu, dugaan penghapusan hasil penyadapan dan jejak aktivitas dalam sistem LIMS juga harus ditelusuri secara menyeluruh.

Bambang mendorong dilakukannya pemeriksaan forensik digital secara independen untuk merekonstruksi seluruh aktivitas sistem, termasuk riwayat akses, perintah, waktu penggunaan, identitas akun, serta kemungkinan perubahan dan penghapusan data.

Menurutnya, pembuktian perkara tidak boleh hanya mengandalkan keterangan pihak-pihak yang berada dalam satu rantai komando."Penyadapan tidak otomatis ilegal. Penyadapan dapat menjadi instrumen yang sah dalam penegakan hukum di kondisi tertentu. Namun, legalitasnya tetap mensyaratkan dasar kewenangan, tujuan yang sah, prosedur, pembatasan obyek, dan pengawasan," jelasnya.

Ia menegaskan, jabatan dan penguasaan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penyadapan tanpa dasar hukum.

"Jabatan tinggi maupun penguasaan teknologi tidak pernah menjadi legitimasi untuk menyadap siapa pun sesuka hati," tambah Bambang.

Untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan kewenangan, Bambang mendorong pemerintah dan DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Menurutnya, selama ini ketentuan mengenai penyadapan masih tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral. Kondisi tersebut membutuhkan harmonisasi agar tidak menimbulkan celah hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

RUU Penyadapan nantinya perlu mengatur secara tegas mekanisme pemberian izin, pembatasan sasaran dan jangka waktu penyadapan, audit teknologi, pencatatan aktivitas sistem yang tidak dapat dimanipulasi, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan hak korban.

Pengawasan yudisial juga harus menjadi bagian penting dalam pengaturan tersebut. Dengan demikian, lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan tidak menjadi satu-satunya pihak yang mengawasi aktivitasnya sendiri.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia meminta pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RUU Penyadapan dengan mengacu pada standar hak asasi manusia (HAM).

Menurut Usman, regulasi tersebut harus memastikan setiap tindakan penyadapan berada di bawah otoritas yudikatif, memiliki perlindungan prosedural yang jelas, dilaksanakan secara transparan, serta disertai mekanisme pengawasan berlapis.

Usman juga mendesak Polri dan lembaga negara lain yang memiliki kewenangan penyadapan agar berhati-hati menggunakan teknologi pengawasan, terutama apabila belum didukung perlindungan hukum yang memadai.

Di tengah sorotan publik, proses penyelidikan dugaan penyadapan ilegal masih berjalan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta masyarakat tidak meragukan objektivitas Polri dalam menangani perkara tersebut.

Yusril menegaskan, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tetap berada di tangan Polri meskipun perkara tersebut diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri menyatakan bahwa dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan resmi institusi kepolisian.

Asep menjelaskan, Polri memiliki aturan internal melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar berjalan sesuai prosedur.

Dalam aturan tersebut, pelaksanaan penyadapan harus memperhatikan prinsip perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan.

Penyadapan juga hanya diperbolehkan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan terhadap tindak pidana yang diatur undang-undang.

Asep memastikan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri akan mengawasi proses penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri serta pemeriksaan etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri .**(Red)**

Dorong Kesadaran Kolektif Kelola Sampah ..... *Halaman 1*

Wesesa dengan nomor kontrak 000.3.2/7242.4 dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp1.563.916.000, masyarakat tentu berharap pembangunan jalan tersebut menghasilkan infrastruktur yang kokoh, aman, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Namun, kondisi tembok penahan yang dilaporkan ambruk serta permukaan aspal yang bergelombang dan berlubang justru menimbulkan tanda tanya besar.

Apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis? Apakah material dan metode konstruksi sudah memenuhi standar? Bagaimana proses pengendalian mutu selama pekerjaan berlangsung?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh, bukan sekadar penjelasan normatif.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi kontrak, pihak terkait harus diminta mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerusakan proyek ini juga menyoroti fungsi pengawasan UPT Wilayah I. Pengawasan pekerjaan konstruksi bukan sekadar memantau aktivitas kontraktor, melainkan memastikan seluruh tahapan pekerjaan memenuhi persyaratan teknis, mulai dari kualitas material, metode pelaksanaan, volume pekerjaan, hingga hasil akhir.

Dalam informasi yang diterima Jaya Pos, seorang pegawai UPT Wilayah I yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut nama Roy Nanda Rahman Rangkuti dalam kaitannya dengan pengawasan pekerjaan tersebut.

Namun, jabatan, kedudukan, serta tanggung jawab yang bersangkutan dalam proyek ini masih perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak UPT Wilayah I.

Jaya Pos menilai, persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka. Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan? Apakah pemeriksaan mutu dilakukan secara berkala? Apakah kerusakan tersebut telah diketahui sebelum pekerjaan dinyatakan selesai?

Jangan sampai fungsi pengawasan hanya sebatas administrasi, sementara persoalan kualitas konstruksi baru menjadi perhatian setelah kerusakan terlihat di lapangan.

Bupati Deli Serdang, H. Asri Ludin Tambunan, diminta memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dengan memerintahkan pemeriksaan langsung terhadap proyek yang menggunakan anggaran daerah itu.

Demikian pula Kepala Dinas PU SDAMBMBK Deli Serdang, Parno, didesak segera menurunkan tim teknis untuk mengevaluasi kondisi fisik bangunan, khususnya tembok penahan jalan yang ambruk serta permukaan aspal yang bergelombang dan berlubang.

Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan secara visual. Diperlukan evaluasi teknis terhadap struktur konstruksi, mutu material, ketebalan aspal, kondisi lapisan pondasi, sistem drainase, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan dokumen kontrak.

Hasil pemeriksaan juga perlu dibuka kepada publik agar masyarakat mengetahui penyebab kerusakan dan langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikannya.

Jika kerusakan terbukti disebabkan oleh pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pemerintah harus mengambil tindakan kontraktual, termasuk memerintahkan perbaikan sesuai kewajiban penyedia jasa dan ketentuan yang berlaku.

Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan sesuai kewenangannya, juga diharapkan mencermati persoalan proyek tersebut apabila terdapat indikasi awal pelanggaran hukum.

Pemeriksaan dapat mencakup dokumen kontrak, spesifikasi teknis, laporan konsultan pengawas, hasil pengujian laboratorium, volume pekerjaan, berita acara pemeriksaan, hingga dokumen pembayaran.

Apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan atau perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur.

Namun, perlu ditegaskan bahwa kerusakan fisik konstruksi tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi atau penyimpangan anggaran. Diperlukan pemeriksaan teknis, administrasi, dan hukum untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

Justru karena itulah pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada saling lempar tanggung jawab.

PT Aspar Sarana Wesesa sebagai pelaksana proyek perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi hasil pekerjaannya. Pihak pengawas juga harus menjelaskan bagaimana pengendalian mutu dilakukan selama pelaksanaan proyek.

Sementara itu, Dinas PU SDAMBMBK berkewajiban memastikan apakah hasil pembangunan telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan kontrak sebelum diterima oleh pemerintah daerah.

Jangan sampai proyek bernilai Rp1,56 miliar hanya dinyatakan selesai secara administratif, tetapi kondisi fisiknya justru menimbulkan persoalan.

Pembangunan infrastruktur bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan atau menghabiskan pagu anggaran. Yang jauh lebih penting adalah mutu, ketahanan, keselamatan, dan manfaatnya bagi masyarakat.

Jaya Pos memandang, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola proyek infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang, khususnya dalam hal pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti ambruknya tembok penahan dan kerusakan permukaan aspal belum dapat dipastikan karena masih memerlukan pemeriksaan teknis. Konfirmasi dari PT Aspar Sarana Wesesa, UPT Wilayah I, dan Dinas PU SDAMBMBK Deli Serdang masih diperlukan.

Anggaran Rp1,56 miliar harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan. Uang rakyat tidak boleh diperlakukan seolah-olah tanpa pengawasan.

(Horas Limbong)

Proyek Jalan Rp1,56 Miliar di Tandam Hilir II Rusak ..... *Halaman 1*

prehensif.

Maka, kesadaran masyarakat patut didorong sehingga tidak menimbulkan dampak ikutan yang semakin pelik. Karena dapat mengganggu aspek kehidupan lain, seperti kelestarian lingkungan, kesehatan maupun gangguan lainnya.

"Kebiasaan masyarakat membuang sampah dengan seenaknya sendiri masih sering dilakukan. Padahal sampah sampah tersebut, seperti sampah rumah tangga dapat dipilah dan digolongkan jenisnya," sebut Novita, Rabu 4 November 2026.

Menurut dia, tata kelola sampah bisa dimulai dari pemilihan jenisnya dahulu, yakni sampah basah dengan sampah kering. Kemudian, sampah bernilai ekonomis serta kelompok residu yang tidak memiliki nilai.

Selain memudahkan, yang terpilah lebih dahulu juga akan mempercepat proses dalam pengelolaan.

Sebab, beberapa jenis sampah membutuhkan waktu relatif lama agar terurai.

"Kalau ini menumpuk melebihi kapasitas Tempat Pembuangan Akhir yang dimiliki, maka kedepannya akan menjadikan permasalahan lingkungan," imbuhnya.

Dengan semangat mendorong dan mengajak kesadaran kolektif, Novita optimis gagasan mengenai GCC lebih efisien. Sekaligus membantu pemerintah dalam mewujudkan visi misi Net Zero Carbon sekaligus menjaga kelestarian alam.

Dalam penguatan pengurus TP PKK, Master of Economic UINSATU itu mengatakan jika apa yang melakukan adalah upaya penguatan bagi seluruh Tim Penggerak PKK.

Baik level kabupaten, kecamatan hingga desa komulatif dengan seluruh komponen kecamatan (Forkopimcam) seperti Pak Camat dan Pak Kades. "Semua level akan mengikuti pembinaan, sebab GCC itu bukan hanya untuk sebagai euforia semata, tapi tujuan kami menyasar ke akar rumput," tandasnya.

Agar, lanjut Novita, kedepan setiap rumah tangga punya kesadaran mandiri bahwa kebersihan dan pemilahan sampah menjadi salah satu langkah menyelamatkan generasi mendatang.

Disatu sisi, mendukung visi misi bupati terkait Net Zero Carbon dan lain sisi untuk menyelamatkan masyarakat itu sendiri.

Sekaligus, akan menjadi sumber-sumber pendapatan baru bagi warga Trenggalek. "Di situasi seperti ini kita harus kreatif bagaimana pentingnya ketahanan pangan dimulai dari anak-anak sedini mungkin," pungkas istri Bupati Trenggalek tersebut. **(HWi)**

Polres Langkat Edukasi Masyarakat ..... *Halaman 1*

dan persuasif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas serta menekan potensi kecelakaan di jalan raya.

Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., Melalui Ps. Kasi humas M. Siregar menyampaikan di Ma polres langkat, 5 November 2026, bahwa edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan Operasi Patuh Toba 2026.

Menurutnya, keselamatan berlalu lintas harus menjadi kesadaran bersama, bukan semata-mata karena adanya pengawasan maupun penindakan petugas.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian memberikan imbauan kepada pedagang dan pembeli agar mengutamakan keselamatan daripada kecepatan, membudayakan tertib berlalu lintas, serta tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan karena dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan.

Petugas juga membagikan brosur Operasi Patuh Toba 2026 sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya.

Sementara itu, kepada para pengguna jalan, petugas mengingatkan pentingnya melengkapi surat-surat kendaraan dan identitas diri, menggunakan helm sesuai ketentuan, serta menjaga konsentrasi selama berkendara. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengemudi dalam kondisi tidak sehat maupun di bawah pengaruh alkohol dan narkoba.

Dalam pelaksanaannya, petugas turut memberikan teguran dan edukasi kepada pelajar yang tidak menggunakan helm maupun berboncengan melebihi kapasitas kendaraan.

Pelajar diarahkan untuk menggunakan angkutan umum demi menjaga keselamatan selama perjalanan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Polres langkat berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas semakin meningkat, angka pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan, serta tercipta situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Polres langkat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Operasi Patuh Toba 2026 dengan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan bersama dan membudayakan tertib berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

(Fatimah)

Herdiat Targetkan Ciamis Kembali ..... *Halaman 1*

tersebut menjadi modal sekaligus motivasi untuk kembali bersaing di papan atas pada Porprov tahun ini.

Herdiat juga mengingatkan para atlet agar tidak mengulang pengalaman pahit Porprov 2014, ketika Kabupaten Ciamis harus puas berada di peringkat ke-26 dari 27 kabupaten/kota peserta.

Menurutnya, prestasi olahraga tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh tekad, kedisiplinan, kesungguhan, serta mental juang para atlet. "Para atlet harus visioner, punya keinginan dan mimpi besar, serta memiliki semangat juang yang tinggi dan mental pantang menyerah. Kami akan sangat bangga apabila dengan anggaran minimalis, para atlet mampu menghasilkan prestasi terbaik," tegas Herdiat.

Ia menambahkan, para atlet yang diberangkatkan bukan sekadar membawa nama daerah, melainkan juga mewakili harapan lebih dari 1,3 juta masyarakat Kabupaten Ciamis.

Karena itu, Herdiat berpesan agar seluruh atlet bertanding dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi sportivitas, dan tidak menjadikan bonus sebagai satu-satunya tujuan dalam meraih prestasi. "Saya titipkan, harus bermain dengan hati, junjung tinggi sportivitas dan jangan asal bermain. Jangan hanya mengejar bonus," pesannya.

Herdiat berharap, dengan semangat juang, kesungguhan, serta dukungan dan doa seluruh masyarakat Tatar Galuh Ciamis, kontingen Kabupaten Ciamis mampu kembali masuk 10 besar Porprov XV Jawa Barat 2026. "Selamat berjuang dan selamat bertanding. Berikan yang terbaik untuk Kabupaten Ciamis," harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triyadi selaku Ketua Kontingen melaporkan, Porprov XV Jawa Barat 2026 akan berlangsung pada 7–20 November 2026 dengan tiga daerah utama penyelenggara, yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok. Upacara pembukaan dijadwalkan berlangsung di Kota Bogor.

Selain tiga kota tersebut, pelaksanaan Porprov juga didukung sejumlah daerah pendamping, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Ciamis.

Andang menyebutkan, Kabupaten Ciamis akan memberangkatkan sebanyak 300 personel kontingen yang terdiri dari 127 atlet putra, 79 atlet putri, 47 ofisial dan 48 panitia kontingen.

Dalam ajang tersebut, kontingen Ciamis akan mengikuti 180 nomor pertandingan dari total 1.156 nomor yang dipertandingkan. Dengan kekuatan tersebut, Kabupaten Ciamis optimistis mampu bersaing dan mempertahankan reputasi sebagai salah satu daerah yang diperhitungkan dalam dunia olahraga Jawa Barat. **(Mamay)**

PWI Half Marathon 2026 Jadi Rangkaian ..... *Halaman 1*

ujar Akhmad Munir.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PWI Pusat sekaligus Ketua Panitia Hari Pers Nasional (HPN), M. Selamet Susanto, menegaskan bahwa PWI Half Marathon 2026 ini adalah pemanasan dan momentum konsolidasi penting menjelang gelaran HPN dan Porwanas 2027 di Lampung.

"PWI Half Marathon 2026 bukan sekadar ajang olahraga biasa, melainkan juga bagian dari gelora semangat dan rangkaian Kick Off menuju Hari Pers Nasional (HPN) dan Porwanas 2027 yang akan datang di Lampung," jelas M. Selamet Susanto.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah — yang didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI Lampung Segan Petrus Simanjuntak serta Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Lampung Lukmansyah — menyampaikan rasa bangga dan kesiapan penuh jajaran PWI Lampung.

"PWI Lampung sangat siap menyukseskan PWI Half Marathon 2026 sebagai rangkaian Kick Off HPN Lampung. Kepercayaan dan dukungan penuh dari PWI Pusat menjadi penambah semangat bagi kami untuk menyajikan event lari yang aman, nyaman, dan berkesan," tegas Wirahadikusumah.

Panitia menyediakan tiga kategori jarak lari, yaitu: Setiap peserta akan mendapatkan BIB with Chip Timing, Jersey eksklusif, Medals Finisher, Refreshment, serta hiburan. Khusus untuk kategori 21K, peserta juga akan mendapatkan Jersey Finisher tambahan.

Selain itu, ajang ini juga bertabur hadiah fantastis dengan doorprize dan hadiah podium mencapai ratusan juta rupiah, termasuk sepeda motor dan berbagai perangkat elektronik.

Pendaftaran dibuka online melalui *https://bit.ly/PWI-RUN* atau scan QR code pada poster resmi.

Info lebih lanjut: Instagram @eventlari_lampung, @kawanlari_lampung, @pwi_lampung, atau HP/WA *0895-2308-1523.**(Red)**

Pemkab Deli Serdang Ajak Masyarakat Bersama-sama Berantas Peredaran Narkoba

Deli Serdang, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian dan keterlibatan dalam mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Upaya pemberantasan narkoba dinilai tidak akan maksimal tanpa dukungan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga hingga pemerintahan desa.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Deli Serdang, Hendra Wijaya, saat mewakili Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat Menolak Narkoba dari Desa. Kegiatan yang digelar Polrestabes Medan itu berlangsung di rumah Kepala Dusun Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Prioritas Kapolri Quick Wins Polisi Bersama Masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Hendra menyampaikan apresiasi Bupati Deli Serdang kepada Kapolrestabes Medan beserta jajaran atas langkah pemberantasan narkoba.



Asisten Perekonomian dan Pembangunan Deli Serdang, Hendra Wijaya, saat mewakili Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan dalam kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat Menolak Narkoba dari Desa. Kegiatan yang digelar Polrestabes Medan itu berlangsung di rumah Kepala Dusun Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu (4/11/2026).(Foto RD)

Menurut Hendra, pencegahan narkoba harus dimulai dari lingkungan masyarakat. Warga diharapkan ikut mengawasi wilayah masing-masing dan tidak memberi kesempatan bagi jaringan peredaran narkoba untuk berkembang.

Hendra juga mengingatkan posisi geografis Deli Serdang yang berbatasan sekaligus mengelilingi Kota Medan serta memiliki akses menuju sejumlah daerah lain. Kondisi tersebut membutuhkan kewaspadaan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menegaskan pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Edukasi dan pencegahan harus berjalan beriringan dengan penindakan.

Pendekatan tersebut dinilai mulai membawa perubahan positif. Masyarakat semakin terbuka terhadap kehadiran aparat kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan.

Calvijn menilai pendekatan serupa perlu diperluas hingga ke tingkat desa dan dusun. Masyarakat juga harus dilibatkan untuk mengenali berbagai faktor yang berpotensi membuat seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Deli Serdang berharap gerakan masyarakat menolak narkoba tidak sekadar menjadi deklarasi. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan, kepedulian, dan tindakan nyata untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.**(Ramdani)**

Polres Maros Gelar Apel Kesiapsiagaan, Pastikan Personel dan Peralatan Siap Hadapi Bencana Alam

Maros, Jaya Pos

Polres Maros menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Search and Rescue (SAR) dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di wilayah Kabupaten Maros. Kegiatan berlangsung di Lapangan Pallantikang, Kantor Bupati Maros, Kamis (5/11/2026).

Apel dipimpin langsung Kapolres Maros AKBP Devi Sujana, S.H., S.I.K., M.H., serta diikuti personel gabungan dari TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Maros, BPBD, Damkar, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya.

Turut hadir Wakil Bupati Maros Andi Mue'tazim Mansyur, S.T., M.Si., Dandim 1422 Maros Letkol Arm Agung Yuhono, S.E., Wakapolres Maros Kompol Andi Asdar, A.Md., serta sejumlah pimpinan instansi terkait di Kabupaten Maros.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Maros bersama unsur terkait melakukan pemeriksaan pasukan dan peralatan SAR guna memastikan kesiapan personel maupun sarana pendukung dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam.



Polres Maros saat gelar apel SAR. (Foto/Eril)

Dalam amanatnya, Kapolres Maros menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini bertujuan memastikan kesiapan seluruh unsur, baik dari aspek personel, peralatan, maupun koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi potensi bencana alam.

Ia menjelaskan, Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 270 kejadian bencana alam, terdiri dari 158 tanah longsor, 80 banjir, dan 32 angin puting beliung. Sementara pada tahun 2026 hingga saat ini tercatat 129 kejadian, meliputi 48 tanah longsor, 47 angin puting beliung, dan 34 banjir.

"Data tersebut menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antarinstansi agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat dan tepat," ujar AKBP Devi Sujana.

Kapolres juga menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, pemangku kepentingan, serta masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polres Maros bersama TNI, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Maros.

(Hk)

Kunjungi Polsek Negara Batin dan Pakuan Ratu, Kapolres Way Kanan Tekankan Disiplin, Integritas, dan Pelayanan Humanis

Way Kanan, Jaya Pos

Memastikan kesiapan personel sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Kepolisian di tingkat wilayah, Kapolres Way Kanan AKBP Ramadhona, S.I.K., melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Negara Batin dan Polsek Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Jum'at (6/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian internal sekaligus memperkuat komitmen seluruh personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).



Kapolres way Kanan Tekankan Disiplin Intergeritas dan Pelayanan Humanis(Humas Polri).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi Kasat Intelkam AKP Mustholih dan Kasipropam Ipda Roni Arifin serta personel Polres Way kanan.

Dalam arahannya, Kapolres memberikan sejumlah penekanan penting kepada seluruh personel, khususnya terkait kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Kapolres menegaskan agar seluruh personel tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan tindak pidana, serta perbuatan lain yang dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Menurutnya, setiap anggota Polri harus mampu menjaga kehormatan institusi dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan keteladanan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

Selain itu, personel diminta senantiasa menjaga stabilitas kamtibmas dengan meningkatkan kewaspadaan serta kemampuan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah hukum masing-masing.

Kapolres juga menekankan pentingnya mendukung dan menyukseskan seluruh program kerja Kapolri melalui implementasi semangat "Polisi Bersama Masyarakat."imbuhnya. **(Suhaili)**

Kepala SDN Sepatan 3 Apresiasi Bupati Tangerang dan Dinas Pendidikan atas Pembangunan Gedung Sekolah Baru

Tangerang, Jaya Pos

Pembangunan gedung baru SD Negeri Sepatan 3, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, mendapat apresiasi dari Kepala SDN Sepatan 3, Saimin Rudianto, S.Pd. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Tangerang, Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si., beserta jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang atas perhatian dan dukungan terhadap peningkatan fasilitas pendidikan di sekolah tersebut.

Ucapan terima kasih itu disampaikan Saimin Rudianto saat ditemui awak media Jaya Pos.com, Rabu (4/11/2026). Menurutnya, bantuan pembangunan gedung sekolah baru tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di lingkungan SDN Sepatan 3.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Tangerang, Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriyadi, S.STP., M.I.P., serta jajaran terkait, khususnya Ibu Dilly selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar, atas bantuan pembangunan gedung baru untuk sekolah kami," ungkap Saimin.

Ia mengatakan, keberadaan gedung baru tersebut diharapkan dapat memberikan suasana belajar yang lebih nyaman, aman, dan kondusif bagi para siswa maupun tenaga pendidik. Dengan fasilitas yang semakin memadai, proses kegiatan belajar mengajar diharapkan berjalan lebih optimal.



Saimin Rudianto,Spd Kepala SD Negeri Sepatan 3 Tangerang Banten. (Foto/Abd)

Menurut Saimin, sarana dan prasarana sekolah memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan. Lingkungan sekolah yang layak dan nyaman tidak hanya mendukung aktivitas belajar, tetapi juga dapat meningkatkan semangat siswa dalam menuntut ilmu serta memotivasi para guru untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik.

Lebih lanjut, Saimin berharap perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan dapat terus ditingkatkan, sehingga seluruh sekolah, khususnya sekolah negeri, memiliki sarana pembelajaran yang layak dan memadai.

Ia juga berharap pembangunan infrastruktur pendidikan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan mutu pembelajaran.

Dengan hadirnya gedung baru SDN Sepatan 3, diharapkan para siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan penuh semangat. Bantuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya generasi penerus bangsa yang cerdas, berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia.

(Abd)

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Minta Pembangunan di DAS Waitomu Mengacu pada Regulasi



Rovik Akbar Afifudin, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku. (Foto/Dok JAPOS.CO)

Ambon, Jaya Pos

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin meminta, agar seluruh aktivitas pembangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Waitomu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Hal ini penting, untuk memastikan pemanfaatan kawasan sungai tidak bertentangan dengan aturan maupun kewenangan instansi terkait.

Penegasan tersebut disampaikan Rovik kepada wartawan di Ambon, Kamis (5/11/2026), menyusul pembahasan persoalan pembangunan di Sungai Waitomu dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Rabu (4/11/2026).

Menurut Rovik, persoalan Pembangunan di DAS Waitomu tidak boleh hanya dilihat dari sisi penghentian sementara aktivitas pembangunan. Lebih dari itu, perlu ada kepastian bahwa setiap kegiatan yang berlangsung di kawasan sungai memiliki dasar hukum, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan, bahwa dalam rapat koordinasi sebelumnya bersama sejumlah pemangku kepentingan, Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto telah menyampaikan keputusan penghentian sementara aktivitas pembangunan di kawasan tersebut.

"Langkah itu harus diikuti dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi yang mengatur pemanfaatan sungai. Prinsipnya, DPRD Provinsi Maluku menjalankan amanat undang-undang. Kalau undang-undang menyatakan tidak bisa, ya tidak bisa. Itu yang paling penting," tegasnya.

Rovik menjelaskan, pengelolaan lima sungai di Kota Ambon merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada BWS.

Atas dasar itu, Komisi III meminta penjelasan langsung dari BWS Maluku, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai kewenangan pengelolaan sungai, fungsi badan sungai, maupun batasan aktivitas pembangunan di kawasan tersebut.

Dari pemaparan BWS Maluku dalam rapat kerja, lanjut Rovik, terdapat sejumlah regulasi mulai dari undang-undang, peraturan presiden hingga peraturan menteri yang mengatur pemanfaatan kawasan sungai, terutama berkaitan dengan garis sempadan.

Akan tetapi, ia menyoroti, bahwa ketentuan mengenai kawasan sempadan tidak dapat serta-merta dijadikan landasan, untuk melakukan pembangunan di bagian tengah atau badan sungai.

"Dari penjelasan regulasi yang ada, pengaturannya lebih kepada kawasan sempadan. Sementara untuk pembangunan di tengah sungai, tidak ada aturan yang bisa membenarkan itu," ujarnya.

Karena itu, Rovik menekankan pentingnya memahami secara tepat perbedaan antara kawasan sempadan dan badan sungai. Menurutnya, pemahaman terhadap aspek hukum tersebut diperlukan, agar tidak ada pihak yang menggunakan ketentuan tertentu sebagai pembenaran terhadap aktivitas yang tidak sesuai aturan.

Ia juga menyebutkan, penjelasan BWS Maluku dalam rapat bersama Komisi III pada dasarnya sejalan dengan keterangan yang telah disampaikan dalam pertemuan koordinasi sebelumnya.

Meski demikian, DPRD Provinsi Maluku belum berhenti pada penjelasan tersebut. Komisi III akan terus mendalami aspek regulasi dan kewenangan masing-masing instansi, agar penanganan persoalan Sungai Waitomu memiliki landasan yang jelas.

Rovik berharap seluruh pihak tidak mengedepankan kepentingan masing-masing, melainkan mengutamakan kepatuhan terhadap hukum, dan menjalankan tanggung jawab sesuai tugas, serta kewenangan yang dimiliki.

"Kita sebagai bagian dari pemerintah harus taat terhadap peraturan perundang-undangan. Tinggal bagaimana aturan yang sudah ditetapkan pemerintah itu dijalankan," tandasnya.

Ia juga mengingatkan, agar setiap instansi maupun pihak yang berkaitan dengan pembangunan di kawasan tersebut menjalankan fungsi masing-masing secara bertanggung jawab. Dengan demikian, persoalan Waitomu dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum, dan tidak terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan di ruang publik. **(Nonie)**

MARI BERSAMA PERANGI NARKOBA

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

JAPOS.CO
Email:japos@yahoo.com
TERVERIFIKASI DEWAN PERS

SENIN: EDISI 865 TAHUN XX, 9 - 15 NOVEMBER 2026 | www.harianjayapos.com | HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

Sekko Jaktim Dukung Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon, 500 Bibit Disiapkan di Waduk Dukuh 2

Jakarta, Jaya Pos

Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Timur, Eka Darmawan, mengikuti Gerakan Nasional Penanaman 1 Juta Pohon Pekarangan yang berlangsung di kawasan Waduk Dukuh 2, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pengukuhan kepengurusan Perhimpunan Insinyur dan Sarjana Pertanian Indonesia (ISPI) periode 2026–2031 yang diketuai Ahmad Sjach.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur, Taufik Yulianto, yang mewakili Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta; Sekretaris Camat Kramat Jati, Husain; serta Lurah Dukuh, Riswanto. Hadir pula jajaran perwakilan satuan pelaksana (Satpel), suku dinas, pemerintah daerah, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 500 bibit tanaman pekarangan dan tanaman pendamping beras. Bibit yang disediakan meliputi 30 tanaman terong, 260 cabai, 10 tomat, 10 kol, 25 jahe, 25 kunyit, 50 lengkuas, 50 serai, lima pohon duku condet, lima pohon sukun, serta 150 bibit ubi jalar.

Selain bibit tanaman, disediakan pula sarana pendukung berupa 30 bungkus tricokompos dengan berat masing-masing lima kilogram dan 50 karung pupuk kandang.

Sekko Administrasi Jakarta Timur, Eka Darmawan, menyampaikan bahwa pemilihan berbagai jenis tanaman hortikultura tersebut memiliki manfaat strategis, terutama dalam mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus membantu mengendalikan inflasi daerah. Pasalnya, sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, kerap menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, keberadaan Waduk Dukuh 2 tidak hanya berfungsi sebagai kawasan penampungan air, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi lingkungan produktif melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pangan.

"Keberadaan waduk ini dan hasil penanaman pohon memiliki manfaat yang besar. Kami berharap masyarakat juga menyiapkan tanaman-tanaman pekarangan di rumahnya, selain mera-

▸▸Halaman 11



Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Timur, Eka Darmawan, mengikuti Gerakan Nasional Penanaman 1 Juta Pohon Pekarangan yang berlangsung di kawasan Waduk Dukuh 2, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Rabu (4/11/2026).(Foto rudolf)

DPRD Kabupaten Pasuruan Manfaatkan Layanan MCU Unggulan RSUD Bangil Jadi Pilihan

Pasuruan, Jaya Pos

Sebagai pilar utama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, kesehatan dan stamina para anggota dewan merupakan prioritas yang tidak boleh diabaikan. Menyadari padatnya agenda kerja dan tingginya mobilitas dalam melayani warga, sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Pasuruan memercayakan pemeriksaan kesehatan tahunan atau Medical Check Up (MCU) mereka kepada RSUD Bangil.

Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk memastikan seluruh wakil rakyat tetap berada

▸▸ Halaman 11


Petugas rumah sakit mbangil ikut timbang berat badan (foto :Japos.co)

Lantik 15 Pangulu dan 93 Anggota Maujana Nagori,

Bupati Simalungun Tekankan Sinergi dan Pelayanan kepada Masyarakat

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melantik 15 Pangulu terpilih hasil Pemilihan Pangulu Antarwaktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2023–2031 sekaligus mengambil sumpah dan janji jabatan 93 Anggota Maujana Nagori untuk masa keanggotaan 2026–2034.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tersebut berlangsung di Balei Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pematang

▸▸ Halaman 11


Bupati Simalungun, Lantik15 Pangulu dan 39 Anggota Maujana Nagori. (Foto/RD)

PMII Kota Banjar Geruduk Kemenag Banjar

Soroti Dugaan Pungli Berkedok 'Amplop Kegiatan'

Banjar, Jaya Pos

Gelombang kekecewaan atas dugaan kepungan praktik pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan keagamaan akhirnya pecah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar dengan aksi ketat dan pernyataan sikap membara, Selasa (3/11).

Mereka meniupkan peluit perlawanan terhadap dugaan praktik pemotongan anggaran yang dinilai menggerogoti integritas lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut. Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua PC PMII Kota Banjar, Joni Setiawan, ini berakar dari deretan aduan dan jeritan masyarakat.

PMII menuding adanya dugaan praktik pungli sistematis dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) yang dikemas rapi dengan modus 'amplop kegiatan'.

Di hadapan jajaran Kemenag Kota Banjar, Joni Setiawan menyampaikan oratoris tajam. PMII


Ketua PC PMII Kota Banjar, Joni Setiawan sewaktu melakukan orasi tudingan adanya dugaan praktik pungli sistematis dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM). (Foto:Mamay)

menegaskan posisinya sebagai penyambung lidah rakyat untuk membersihkan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan dari intrik komersialisasi birokrasi. "Kami menerima aduan langsung dari masyarakat terkait dugaan praktik pemotongan biaya bermodus amplop kegiatan pada proses PKKM. Ini haram hukumnya!" tegas Joni sembari menekankan evaluasi dan visitasi tim Kemenag itu sudah dibiayai penuh oleh DIPA negara, tidak boleh ada sepeser pun beban yang ditumpahkan ke pihak madrasah.

Dalam orasinya tersebut PMII melayangkan enam tuntutan darurat diantaranya untuk mengusut tuntas pungli PKKM dengan mendesak pengusutan transparan atas modus amplop kegiatan pada penilaian kepala madrasah. Transparansi Anggaran DIPA dengan

▸▸ Halaman 11

DPP Topan-RI Soroti Penggunaan Dana Bos dan BOP SMAN 90 Tahun 2024-2025

Jakarta, Jaya Pos

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Pusat Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (DPP TOPAN-RI) menyoroti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2024-2025 di SMAN 90 Jakarta.

Sorotan tersebut muncul setelah DPP TOPAN-RI menilai klarifikasi tertulis yang disampaikan pihak sekolah belum menjawab seluruh pertanyaan terkait penggunaan anggaran.

Sebelumnya, Kepala SMAN 90 Jakarta, Dra. Siti Maemunah, M.Pd., telah memberikan tanggapan melalui surat bernomor 2079/PK.01.03 tertanggal 22 Oktober 2026. Namun, DPP TOPAN-RI menilai penjelasan tersebut masih bersifat umum dan perlu diperkuat dengan dokumen pendukung.

Ketua Umum DPP TOPAN-RI, Sumondang Simangunsong, SH, MH, mengatakan pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara tepat dan sesuai ketentuan.



Sekolah SMAN 90 Jakarta (Foto: Zeus)

Menurutnya, pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan pihak sekolah, melainkan memastikan dana negara benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Kami menghargai respons pihak SMAN 90 Jakarta yang telah memberikan klarifikasi tertulis. Namun, dalam prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas keuangan negara, masyarakat berhak mengetahui kewajaran harga satuan belanja, mulai dari pengadaan fisik hingga perangkat IT, termasuk bukti transaksi nontunai melalui platform resmi SIPLah," ujar Sumondang kepada awak media di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Berdasarkan hasil telaah Bidang

▸▸ Halaman 11


Wakapolres Simalungun Kumpul Bersama Warga Pematang Raya,Serap Aspirasi Soal Narkoba. (Foto/RD)

Wakapolres Simalungun Kumpul Bersama Warga Pematang Raya, Serap Aspirasi soal Narkoba, Judi Daring hingga Knalpot Brong

Simalungun, Jaya Pos

Wakapolres Simalungun KOMPOL Imam Alriyuddin, S.H., M.H., mewakili Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., melaksanakan Program Prioritas Kapolri "Kumpul Bersama Masyarakat" di Aula Kelurahan Pematang Raya, Jalan Saribu Dolok No. 17, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Kamis (5/11/2026). Kegiatan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga sekira pukul 11.40 WIB dan berjalan aman tanpa kendala.

Kegiatan ini merupakan implementasi program Polisi Bersama Masyarakat di wilayah hukum Polres Simalungun. Hadir mendampingi Wakapolres, Kasat Binmas AKP Dorlan Pasaribu, Kapolsek Raya AKP Oloan Sijabat, PS Kasi Hukum IPTU Niasran H. Simanjuntak, S.H., M.H., KBO Sat Binmas IPTU M. Arifin Harahap, Kanit Intelkam Polsek Raya IPDA Jhon Saragih, S.H., PS Kanit Binmas Polsek Raya AIPTU Sugino, serta personel Polsek Raya.

Dari unsur masyarakat, hadir Lurah Pematang Raya Jon Sarwedi Purba, Sekretaris LPM Apri Nopjun Sumbayak, tokoh pemuda Helman Saragih, tokoh masyarakat Pardi

▸▸Halaman 11

Pemkot Jakarta Selatan Revitalisasi Rumah Korban Kebakaran di Menteng Atas

Jakarta, Jaya Pos

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan revitalisasi atau membangun kembali rumah korban kebakaran di kawasan RW 13, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi. Pembangunan kembali ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, Jumat (6/11).

Walikota Syafrin mengatakan, kebakaran tersebut berdampak pada 17 kepala keluarga (KK) atau 74 jiwa.

"Dari total 17 KK yang terdampak, tujuh KK menumpang di kediaman kerabat, sementara 10 KK lainnya diakomodasi di Rusun Pasar Rumput," ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan kembali rumah warga mendapat dukungan pendanaan dari Baznas (Bazis) DKI Jakarta. Setiap unit rumah mendapatkan alokasi anggaran Rp55 juta dengan standar luas bangunan 30 meter persegi.

"Proses pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 1,5 bulan sehingga warga dapat segera kembali menempati rumah yang layak dan aman," katanya.



Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, memberikan sambutan saat acara peletakan batu pertama.

Selain pembangunan rumah, Syafrin juga mengingatkan pentingnya upaya pencegahan kebakaran di lingkungan permukiman. "Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain standarisasi instalasi listrik, audit kelistrikan, serta edukasi mengenai penggunaan stop kontak yang aman," tambahnya.

Sementara itu, Ketua RW 13 Menteng Atas, Abdillah Arrahman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu warga, mulai dari penanganan saat kebakaran hingga proses pemulihan pascakejadian.

"Alhamdulillah bantuan pascakebakaran terus mengalir hingga saat ini. Kami juga sangat bersyukur adanya uluran tangan pemerintah dalam membangun kembali rumah yang terbakar. Semoga semua kebaikan diganti dengan pahala yang berlimpah," tandasnya.

(Jiston)

Perbup Zakat Ciamis Jadi Rujukan BAZNAS Bungo



Sekda Ciamis, Andang Firman T sewaktu menerima rombongan BAZNAS Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Perbup Zakat Ciamis menjadi perhatian BAZNAS Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Regulasi yang memperkuat sinergi pemerintah daerah dan BAZNAS itu dinilai penting untuk meningkatkan penghimpunan serta pengelolaan zakat.

Ketertarikan terhadap Perbup Zakat Ciamis tersebut terungkap saat BAZNAS Kabupaten Ciamis menerima kunjungan studi tiru BAZNAS Kabupaten Bungo, Selasa (3/11).

Rombongan dipimpin Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, bersama Ketua BAZNAS Bungo, H. Daminis. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Bungo ingin mempelajari strategi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS), terutama terkait dukungan kebijakan pemerintah daerah dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, mengatakan sejumlah program pengelolaan zakat di daerahnya sebenarnya telah berjalan. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar penghimpunan dan penyaluran zakat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Menurut Tri Wahyu, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam memperkuat dukungan terhadap BAZNAS, khususnya mendorong ASN yang telah memenuhi ketentuan nisab untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. "Kami melihat banyak hal yang bisa dipelajari dari Ciamis. Programnya sebenarnya ada juga di Bungo, tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Kami ingin mengetahui bagaimana strategi dan dukungan pemerintah daerah sehingga pengelolaan zakat di Ciamis bisa berjalan seperti sekarang," ujarnya. Ia berharap pengalaman Kabupaten Ciamis dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi untuk mengembangkan pengelolaan zakat di Kabupaten Bungo.

Tri Wahyu juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan masyarakat Ciamis. Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi modal penting dalam menggerakkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Ciamis, Drs. H. Lili Miftah, M.BA., menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai studi tiru menjadi momentum bagi kedua daerah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat pengelolaan zakat.

Lili menegaskan, setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu, BAZNAS harus terus belajar serta terbuka terhadap pengalaman daerah lain demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Setiap daerah punya kelebihan dan kekurangan. Kita harus saling belajar dan berbagi pengalaman. Jangan merasa paling hebat atau paling pintar sendiri, karena masih banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang lain," tegasnya.

Menurut Lili, dukungan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan zakat. Gerakan BAZNAS dalam mengajak masyarakat berzakat akan lebih kuat apabila didukung kebijakan dan regulasi kepala daerah. "Konsep dan regulasi harus berjalan bersama. Kalau hanya BAZNAS yang mengajak masyarakat berzakat, tentu berbeda ketika pemerintah daerah juga ikut mendorong. Di sinilah pentingnya sinergi dengan umaro," jelasnya.

Di Kabupaten Ciamis, dukungan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 yang ditetapkan pada 28 Februari 2023. Regulasi ini menjadi landasan pengelolaan ZIS, termasuk pengaturan zakat penghasilan bagi ASN yang telah memenuhi ketentuan nisab melalui BAZNAS Ciamis.

Melalui regulasi tersebut, pengelolaan dan penghimpunan zakat diharapkan semakin terarah, terorganisasi, serta mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Lili berharap pengalaman yang diperoleh BAZNAS Bungo dapat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Sebab, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Kunjungan studi tiru ini diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama dan pertukaran pengalaman antara BAZNAS Ciamis dan BAZNAS Bungo. Dengan dukungan regulasi, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, pengelolaan zakat diharapkan semakin optimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat. **(Mamay)**

Hutan Hatonduhan Diduga Dibabat Alat Berat, Aparat Diminta Usut Hingga ke Pematangsiantar

Simalungun, Jaya Pos

Aktivitas penebangan pohon yang diduga berlangsung di kawasan hutan Kampung Rondang, Nagori Tangga Batu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, memicu kemarahan warga. Pasalnya, pada Rabu (4/11/2026), warga memergoki langsung keberadaan alat berat jenis excavator dan sejumlah truk yang diduga disiapkan untuk mengangkut kayu hasil tebangan dari kawasan tersebut.

Temuan ini bukan sekadar informasi dari mulut ke mulut. Warga mengaku memiliki dokumentasi berupa foto dan video yang memperlihatkan kondisi lokasi, jalan yang telah dibuka menembus kawasan hutan, alat berat yang sedang beroperasi, serta kayu-kayu hasil tebangan yang berserakan di tanah.

Dalam dokumentasi tersebut, tampak sebuah excavator berwarna kuning berada di tengah kawasan hutan. Sementara itu, dua unit truk pengangkut kayu terlihat berada di lokasi yang diduga menjadi jalur pengeluaran hasil tebangan.

Sejumlah pohon berukuran besar yang sebelumnya tumbuh di kawasan tersebut dilaporkan telah ditebang. Batang pohon terlihat terpotong-potong, sedangkan sebagian lainnya telah ditumpuk di sekitar lokasi.

Melihat kondisi tersebut, warga yang berada di lokasi langsung menghentikan aktivitas pekerjaan dan meminta operator alat berat memberikan penjelasan.

"Ini bukan lagi sekadar penebangan biasa. Kami melihat sendiri bagaimana alat berat bekerja di dalam kawasan hutan. Operator mengatakan baru masuk hari ini, tetapi faktanya sudah banyak pohon yang tumbang dan dipotong-potong," tegas Muliyono, salah seorang warga yang berada di lokasi.

Menurut Muliyono, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pembukaan jalan dan penebangan pohon di kawasan hutan, apabila dilakukan tanpa dasar perizinan yang sah, berpotensi menimbulkan persoalan hukum sekaligus ancaman ekologis bagi masyarakat sekitar.

Ia mengingatkan, hutan memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Apabila kerusakan terus berlangsung, masyarakat di wilayah sekitar berpotensi menghadapi risiko meningkatnya limpasan air, erosi, banjir, hingga longsor.

Hal lain yang menjadi perhatian warga adalah dugaan bahwa aktivitas penebangan tidak hanya berlangsung di satu titik. Warga menyebut menemukan indikasi pembukaan dan penebangan di beberapa lokasi.

Jika dugaan tersebut benar, aparat perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan luas kawasan yang terdampak, jumlah pohon yang ditebang, pihak yang mengoperasikan alat berat, serta siapa yang memberikan perintah dan membiayai kegiatan tersebut.


Hutan Hatonduhan Di Bantai,Warga Pergoki Alat Berat dan Truk Pengangkut Kayu , Di duga Di bawa Kesiantar. (Foto/Dok JAPOS.CO)

Gomgom, warga lainnya, mendesak agar seluruh aktivitas dihentikan sementara sampai ada kejelasan mengenai status kawasan dan legalitas pekerjaan.

"Kalau memang memiliki izin, tunjukkan dokumen dan batas kawasan yang menjadi dasar kegiatan tersebut. Jangan sampai masyarakat hanya diminta menerima begitu saja, sementara hutan yang menjadi penyangga kehidupan kami terus berkurang. Sebelum ada kejelasan legalitas, hentikan dulu aktivitasnya," tegas Gomgom.

Persoalan semakin serius setelah muncul informasi dari warga bahwa kayu-kayu hasil tebangan tersebut diduga akan dibawa ke Kota Pematangsiantar.

Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti siapa pemilik kayu, perusahaan atau pihak yang mengangkutnya, serta lokasi pengolahan kayu yang diduga menjadi tujuan pengiriman.

"Informasi yang kami dengar, kayu-kayu ini dibawa ke Siantar. Tetapi kami tidak tahu sawmill yang mana. Ada banyak pemain di sini. Kami juga mendengar ada pihak dari Porsea dan Toba yang terlibat," ungkap seorang warga.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi. Karena itu, aparat penegak hukum perlu menelusuri rantai distribusi kayu, mulai dari lokasi penebangan, pengangkutan, dokumen asal-usul kayu, hingga pihak yang menerima dan mengolahnya.

Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada operator alat berat atau sopir truk. Jika ditemukan unsur pelanggaran, pihak yang memberikan perintah, pemodal, pemilik kayu, pengangkut, hingga penadah harus diperiksa sesuai peran dan bukti yang ditemukan.

Warga menyebut aktivitas penebangan berlangsung di kawasan yang mereka ketahui berada dalam wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Informasi mengenai lokasi tersebut perlu segera diklarifikasi. Apakah titik penebangan benar berada di dalam areal konsesi TPL? Apakah kegiatan tersebut merupakan bagian dari aktivitas resmi pemegang izin? Jika benar, siapa pelaksana pekerjaan dan apa dasar perizinannya?

Sebaliknya, apabila aktivitas itu dilakukan pihak lain tanpa persetujuan atau di luar ketentuan yang berlaku, siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengamanan kawasan?

Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka. Keberadaan suatu konsesi tidak serta-merta membenarkan setiap aktivitas penebangan di dalamnya. Seluruh kegiatan tetap harus sesuai dengan batas areal, dokumen perizinan, rencana kerja, serta ketentuan pengelolaan hutan yang berlaku.

Pihak TPL juga perlu memberikan penjelasan resmi mengenai status lokasi dan aktivitas yang dipersoalkan warga agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Aktivitas penebangan, pengangkutan, maupun perdagangan kayu dari kawasan hutan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan perundang-undangan.

Sejumlah regulasi yang relevan untuk ditelusuri dalam perkara ini antara lain:

UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah, antara lain mengatur larangan penebangan, pengangkutan, penguasaan, dan perdagangan hasil hutan secara tidak sah.

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah, mengatur perlindungan kawasan hutan dan larangan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan kehutanan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, mengatur sanksi terhadap perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Penerapan pasal pidana dan ancaman hukumannya harus ditentukan berdasarkan status kawasan, jenis perbuatan, unsur kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta hasil penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, tidak setiap aktivitas penebangan otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa pemeriksaan unsur-unsur hukumnya.

Atas temuan tersebut, warga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret.

Ada lima hal yang menjadi tuntutan warga:

Menghentikan sementara aktivitas penebangan dan mengamankan alat berat serta kendaraan pengangkut untuk kepentingan pemeriksaan apabila ditemukan dasar hukum yang cukup.

Memeriksa operator, pemilik alat berat, pemilik kendaraan, serta pihak yang diduga memerintahkan dan membiayai kegiatan tersebut.

Menelusuri asal-usul dan jalur distribusi kayu yang diduga dibawa ke Pematangsiantar, termasuk memeriksa tempat pengolahan kayu atau sawmill yang menerima pasokan.

Memastikan batas dan status kawasan, termasuk mengklarifikasi dugaan lokasi penebangan yang disebut berada dalam wilayah konsesi TPL.

Meminta Gakkum Kehutanan, Polda Sumatera Utara, Polres Simalungun, dan instansi kehutanan terkait turun langsung melakukan pemeriksaan lapangan.

"Jangan tunggu sampai hutan kami habis baru ada tindakan. Kami berharap aparat benar-benar turun dan memeriksa semuanya. Jangan sampai masyarakat merasa harus bertindak sendiri karena persoalan ini tidak kunjung mendapat kejelasan," pungkas warga.

Kasus ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Dokumentasi yang dimiliki warga, keberadaan alat berat, kendaraan pengangkut, serta temuan kayu hasil tebangan merupakan informasi awal yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung.

Publik kini menunggu langkah nyata: apakah aktivitas tersebut memiliki dasar hukum yang sah atau justru terdapat dugaan pelanggaran kehutanan yang harus diproses?

Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, aparat perlu menjelaskan dasar legalitas kegiatan tersebut kepada masyarakat. Namun, apabila ditemukan unsur pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, warga mengaku masih memantau lokasi dan menyimpan dokumentasi foto maupun video sebagai bahan laporan.

Hutan bukan hanya soal kayu dan nilai ekonomi. Hutan adalah penyangga kehidupan masyarakat. Karena itu, siapa pun yang melakukan aktivitas di dalamnya wajib tunduk pada hukum. Jangan sampai kerusakan terjadi di depan mata, sementara pengawasan dan penegakan hukum justru terlambat. **(Rd)**

Harian JAYA POS
Perubahan Menuju Kemajuan

Panitia Jubileum 50 Tahun HKBP Cengkareng Audiensi dengan Wali Kota Jakarta Barat



Panitia Jubeleum 50 Tahun HKBP Cengkareng dasambut baik oleh Walikota Jakarta Barat, Hj. Iin Mutmainnah,S. Sos,M.Si (kanan). (Foto/A1)

Jakarta, Jaya Pos

Panitia Jubileum 50 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cengkareng, Jakarta Barat, melakukan audiensi dengan Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Hj. Iin Mutmainnah, S.Sos., M.Si, Rabu, (4/11/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menyampaikan undangan resmi kepada Wali Kota agar berkenan hadir dalam perayaan puncak Jubileum Emas HKBP Cengkareng.

Rombongan panitia dipimpin Ketua Panitia Jubileum 50 Tahun HKBP Cengkareng, St. Drs. Parsaoran Marbun, didampingi Pendeta Ressort HKBP Cengkareng, Pdt. Kamiden, S.Th., M.Div., bersama sejumlah perwakilan panitia.

Dalam audiensi tersebut, Parsaoran Marbun menyampaikan bahwa perayaan Jubileum 50 Tahun HKBP Cengkareng merupakan bersejarah bagi seluruh jemaat. Perjalanan setengah abad gereja ini bukan sekadar menandai pertambahan usia, tetapi juga menjadi refleksi atas perjalanan pelayanan, pertumbuhan iman, kebersamaan jemaat, serta kontribusi gereja bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Ia menjelaskan, perayaan puncak Jubileum 50 Tahun HKBP Cengkareng dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 15 November 2026, bertempat di Gereja HKBP Cengkareng, Jalan Gereja No. 1 (BGN), Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Menurut Parsaoran, perayaan tersebut diharapkan menjadi kebersamaan bagi seluruh jemaat, tokoh masyarakat, pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat yang selama ini turut mendukung perjalanan dan pelayanan HKBP Cengkareng.

Lebih lanjut disampaikan, panitia juga berharap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dapat menghadiri perayaan bersejarah tersebut. Kehadiran pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai akan menjadi bentuk perhatian dan dukungan pemerintah terhadap kehidupan keagamaan serta kerukunan umat beragama di Ibu Kota.

Menanggapi undangan tersebut, Wali Kota Jakarta Barat, Hj. Iin Mutmainnah, menyambut baik kedatangan rombongan panitia Jubileum 50 Tahun HKBP Cengkareng. Ia mengapresiasi undangan yang disampaikan dan menilai perayaan 50 tahun perjalanan sebuah gereja merupakan peristiwa penting yang patut dihargai.

Iin menyampaikan bahwa undangan tersebut merupakan suatu kehormatan. Karena itu, dirinya menyatakan akan hadir dalam perayaan Jubileum Emas HKBP Cengkareng.

Ia juga menjelaskan, apabila Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkesempatan hadir, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tentu akan menyesuaikan kehadiran dan koordinasi dengan agenda serta protokol Gubernur.

"Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami karena telah diundang dalam perayaan Jubileum 50 Tahun HKBP Cengkareng. Tentu kami menyambut baik undangan tersebut dan akan berupaya hadir. Apabila Bapak Gubernur juga hadir, tentunya kami akan menyesuaikan dengan koordinasi protokol," ungkap Iin.

Dalam kesempatan tersebut, pembicaraan juga menyinggung pentingnya membangun hubungan harmonis antara pemerintah, gereja, dan masyarakat. Menurut Iin, rumah ibadah tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat menjalankan kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi pusat pembinaan moral, penguatan nilai-nilai sosial, serta pengembangan kepedulian terhadap sesama.

Ia berharap HKBP Cengkareng yang telah memasuki usia 50 tahun dapat terus meningkatkan peran sosialnya, memperkuat toleransi, serta menjadi bagian dari upaya menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat Jakarta Barat yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang beragam.

Selain itu, Iin menyampaikan bahwa keberagaman agama dan terjaganya kerukunan antarumat beragama turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Hal tersebut tercermin dari berbagai kegiatan keagamaan dan budaya yang diselenggarakan dalam dua tahun terakhir, seperti Christmas Carol di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), perayaan Idulfitri, serta Cap Go Meh.

Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi simbol toleransi dan keharmonisan masyarakat Jakarta, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Citra Jakarta sebagai kota yang menjunjung tinggi keberagaman dan kerukunan antarumat beragama menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung.50 Tahun menjadi momentum untuk mengenang sejarah berdirinya gereja, menghargai perjuangan para pendahulu, sekaligus memperbarui komitmen pelayanan bagi generasi mendatang.

Selama lima dekade, HKBP Cengkareng telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan masyarakat Cengkareng dan sekitarnya. Gereja tidak hanya menjalankan pelayanan spiritual bagi jemaat, tetapi juga diharapkan terus mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.Audiensi dengan Wali Kota Jakarta Barat ini menjadi salah satu langkah panitia untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah menjelang pelaksanaan perayaan puncak.

Panitia berharap perayaan Jubileum Emas tersebut dapat berlangsung dengan khidmat, tertib, dan penuh sukacita serta menjadi kesempatan mempererat hubungan antara gereja, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengusung semangat perjalanan 50 tahun, HKBP Cengkareng diharapkan semakin bertumbuh dalam iman, semakin kuat dalam pelayanan, serta terus memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. **(A1)**

Wisuda Perdana INU Ciamis Kukuhkan 106 Sarjana



Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, yang mewakili Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada 106 wisudawan dan wisudawati Institut Nahdlatul Ulama (INU) Ciamis yang mengikuti prosesi wisuda perdana. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada 106 wisudawan dan wisudawati Institut Nahdlatul Ulama (INU) Ciamis yang mengikuti prosesi wisuda perdana, Minggu (1/11).

Apresiasi tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, yang mewakili Bupati dalam kegiatan wisuda di Gedung KH. Irfan Hielmy, Kompleks Islamic Center Ciamis.

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda, Bupati Herdiat menyampaikan bahwa wisuda bukan sekadar seremoni akademik ataupun penanda berakhirnya suatu jenjang pendidikan. Lebih dari itu, wisuda merupakan momentum penting atas keberhasilan perjalanan intelektual, pembentukan kedewasaan berpikir, serta pembangunan karakter dan kepribadian. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini telah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dan secara resmi menyandang gelar akademik sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing," demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.

Herdiat juga mengingatkan bahwa keberhasilan yang diraih para lulusan tidak terlepas dari perjuangan panjang, ketekunan belajar, pengorbanan waktu, serta doa dan dukungan keluarga.

Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, perguruan tinggi dituntut mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, kreatif, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial.

Ia menilai INU Ciamis memiliki peran penting dalam menghadirkan pendidikan yang memadukan keluasan wawasan keilmuan dengan kedalaman nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Herdiat menyampaikan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki cita-cita besar untuk terus berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan tetap berpijak pada nilai religius serta kearifan lokal masyarakat Galuh.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memang penting. Namun, pembangunan manusia merupakan aspek yang jauh lebih mendasar untuk mewujudkan kemajuan daerah.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat. "Dengan kolaborasi yang baik, ilmu pengetahuan yang berkembang di lingkungan akademik dapat diterjemahkan menjadi solusi atas berbagai persoalan nyata di tengah masyarakat," demikian pesan Herdiat.

Kepada para lulusan, Herdiat berharap ilmu dan gelar akademik yang diperoleh tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mendorong para wisudawan dan wisudawati agar menjadi bagian dari generasi yang ikut membangun Kabupaten Ciamis, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan Indonesia.

Menutup sambutannya, Herdiat kembali menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh lulusan INU Ciamis. Ia berharap ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat serta setiap langkah ke depan senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan.

"Semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat, langkah ke depan senantiasa diberikan kemudahan, dan setiap ikhtiar yang dilakukan membawa keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama," harapnya.

Tampak hadir sejumlah tokoh dan pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Dr. H. Addin Jauharudin, Sekretaris Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah II Jawa Barat, Prof. Dr. H. Hernawan, M.Ag., Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Kapolres Ciamis, jajaran Forkopimda, serta pengurus PCNU Kabupaten Ciamis, termasuk Rais Syuriah.

Rektor INU Ciamis, Dr. H. Kusoy Fadiliah, M.Si., mengatakan wisuda pertama tersebut merupakan hasil dari perjalanan panjang dalam membangun perguruan tinggi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, mendirikan perguruan tinggi membutuhkan proses yang tidak mudah.

Mulai dari membangun sistem akademik, menyiapkan tenaga sumber daya manusia, memperkuat tata kelola kelembagaan, hingga memperoleh kepercayaan masyarakat. "Kita memulai perjuangan ini dari nol. Namun, kita tidak pernah berniat menjadikan nol sebagai batas akhir. Apa yang kita saksikan hari ini merupakan hasil dari keyakinan, doa, kerja keras, dan kebersamaan banyak pihak," kata Kusoy.

Ia menjelaskan, sejak awal pendiriannya, INU Ciamis memiliki komitmen untuk membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas, terjangkau, dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kesempatan belajar yang terbuka bagi lulusan madrasah, kalangan santri, guru, hingga generasi muda dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Kusoy menegaskan, keterjangkauan biaya pendidikan harus tetap berjalan beriringan dengan kualitas akademik dan profesionalitas pengelolaan kampus.

"Terjangkau bukan berarti murahan. Biaya pendidikan yang terjangkau tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi mutu. Justru bagaimana kita menjaga kualitas dengan pengelolaan yang profesional menjadi tantangan yang harus dijawab bersama," pungkasnya.

(Mamay)

Serahkan Penghargaan BSA 2026 Kepada Kelurahan Utan Kayu Selatan



Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, kepada Lurah Utan Kayu Selatan, Ria Handayani, di Ballroom Pullman Hotel and Resort, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026). (Foto Simbolon)

Jakarta, Jaya Pos

Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, berhasil meraih penghargaan kategori Nyaman dalam ajang Benyamin S Award (BSA) 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, kepada Lurah Utan Kayu Selatan, Ria Handayani, di Ballroom Pullman Hotel and Resort, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).

Penyerahan penghargaan turut disaksikan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin. Capaian ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen jajaran Kelurahan Utan Kayu Selatan bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan permukiman yang nyaman, aman, dan tertata melalui berbagai inovasi serta kolaborasi.

Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan apresiasi kepada para lurah yang berhasil meraih penghargaan maupun masuk dalam jajaran finalis BSA 2026. Sebagai bentuk penghargaan sekaligus upaya peningkatan kapasitas aparatur wilayah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada 10 lurah finalis untuk mengikuti program pembelajaran ke luar negeri.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan, mengembangkan pola pikir, serta memberikan perspektif baru bagi para lurah dalam mengelola wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Ini apresiasinya ya, 10 kelurahan tadi finalis, Pemprov DKI akan memberikan kesempatan belajar ke luar negeri. Supaya cara pandang, berpikir mengalami perubahan," ujar Pramono.

Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas prestasi yang diraih Kelurahan Utan Kayu Selatan. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, yang berhasil masuk dalam 10 besar finalis BSA 2026.

"Atas nama Wali Kota Administrasi Jakarta Timur dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, saya mengucapkan rasa syukur dan bangga atas capaian yang berhasil diraih oleh Ibu Lurah Utan Kayu Selatan, Ibu Ria, beserta jajaran dan seluruh warganya. Ini merupakan bentuk nyata kontribusi Jakarta Timur dalam mewujudkan kota yang bersih, nyaman, indah, dan sejahtera," ungkapnya.

Munjirin berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi Kelurahan Utan Kayu Selatan untuk terus mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas lingkungan. Ia juga mengajak seluruh camat dan lurah di Jakarta Timur untuk memperkuat sinergi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi warga.

Dalam penilaian kategori Nyaman, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah upaya lurah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, menciptakan wilayah yang aman dan tertata, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan perkotaan.

Lurah Utan Kayu Selatan, Ria Handayani, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara jajaran kelurahan dan masyarakat yang secara aktif terlibat dalam berbagai program serta inovasi lingkungan.

Sejumlah inovasi yang dikembangkan di wilayahnya antara lain Portal RW, penerapan teknologi Internet of Things (IoT), pembangunan vertical garden, pemasangan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan, serta pemanfaatan pengeras suara (toa) sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

Selain itu, warga juga berinisiatif membangun akses jalan secara swadaya dengan memanfaatkan material batu licin. Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari langkah bersama dalam meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas lingkungan permukiman.

"Sejumlah inovasi yang dikembangkan di antaranya Portal RW, ada IoT (Internet of Things), vertical garden, CCTV di wilayah, lalu ada toa untuk pemberian informasi, kemudian pembuatan jalan dari swadaya warga menggunakan batu licin, dan lain-lain," jelas Ria.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran kelurahan, pengurus wilayah, serta elemen masyarakat yang telah berkolaborasi dan memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan di Utan Kayu Selatan.

Ria berharap penghargaan Benyamin S Award 2026 dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk terus berinovasi, menjaga kenyamanan lingkungan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Prestasi Kelurahan Utan Kayu Selatan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun lingkungan permukiman yang nyaman, aman, tertata, dan berkelanjutan. Partisipasi aktif warga yang didukung inovasi di tingkat wilayah menjadi modal penting dalam mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan yang semakin baik.

(Jiston)

Harian JAYA POS Perubahan Menuju Kemajuan
Terbit Setiap Minggu

Diterbitkan Oleh:
PT. Media Cipta Jaya Selaras
SK MENKUM & HAM RI:
Nomor: AHU-19831.40.10.2014
Hak Merek Hukum & HAM No. IDM000299337
NPWP No: 70.947.655.0-001.000
SIUP No: 07715-05/PM/1.824.271
Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220104340564

REDAKSI:
Jl. Komplek Depag Blok G2 No. 83 RT. 012 RW. 003
Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat
Telp: (021) 23095745
e-mail: harianjayapos@yahoo.co.id
Website: www.harianjayapos.com

Pemimpin Umum:
Drs. John Hotman Malau, M.Si
Wakil Pemimpin Umum:
Leonardus Pasaribu, SH.
Badar Subur

Pemimpin Redaksi/P. Jawab: Toni Limbong, SH.
Wakil Pemimpin Redaksi : Anrico Pasaribu, ST., SH.
Redaktur Pelaksana: Pahotan Sinaga
Pemimpin Perusahaan: Febri Oloan Seim Brando, S.Ak
Sekretaris Redaksi: Jaya Hasni S.
Manager Pemasaran/Iklan: Nadia Margaretha

DEWAN REDAKSI:
Toni Limbong, SH, Anrico Pasaribu,ST, SH
Pahotan Sinaga, Dede Rostini

REDAKTUR EKSEKUTIF:
A. Ristanto , Charles Limbong
REDAKTUR:
Dede Rostini
DESAIN GRAFIS/IT:
Agus Wiro
PHOTO GRAPHER
Hengki Lumbantoruan

Sumatera Utara: Rikkot Manik
Riau: .....
Sumatera Selatan: .....
Bangka Belitung: Yustami Al
Jambi: Kusuma Inrda Wijaya
Sumatera Barat: Zakirman
Banten: Guntur Sihombing
Bengkulu:
DKI Jakarta: Jama Berutu
Lampung: Suhaili
Jawa Tengah: M. Sofi
Jawa Barat: Hendry Hutagalung
Jawa Timur: Wiro Utomo
Sulawesi Selatan: Muh. Hakim
Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi
Sulawesi Tengah Heriyanti
Kalimantan Barat : Suhardi
Kalimantan Timur .....

STAF REDAKSI:
JS. Purba | Jama Berutu | Jitro Limbong | Gurning | Jiston Sitohang | Sumihar, SH | Michael J Manurung | | Sutanto
LITBANG:
Lamser Limbong
SIRKULASI:
Nelson Hutapea
PENASEHAT HUKUM:
Andar Situmorang SH. MH. | Anrico Pasaribu, ST., SH.

PENASEHAT:
Tom Pasaribu, Andar Situmorang, SH.
ML. Carlos Melgares Varon, P.hd.
Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MH.

REKENING BANK:
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Pramuka
Rek. No. : 1148-01-000156-30-1
a/n PT Media Cipta Jaya Selaras
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Daan Mogot
Rek. No. : 0379-01-002054-50-7
a/n Toni Limbong
- Bank BCA Cab. Daan Mogot
Rek. No. : 1984084008
a/n Toni Limbong

PERCETAKAN: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika
Alamat: Jl. Raya Benda No. 26C, Rawa Bokor, Kota Tangerang
Telp: (021) 5553472, Fax: (021) 5553473
(Isi diluar tanggungjawab percetakan)

Pengawas Sebut 26 Sekolah di Sepatan Timur Miliki Sarana dan Prasarana yang Baik

Tangerang, Jaya Pos

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di 26 sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten, secara umum dinilai dalam kondisi baik. Meski demikian, pemeliharaan dan peningkatan fasilitas sekolah tetap menjadi perhatian guna menunjang kenyamanan serta kelancaran proses belajar mengajar.

Hal tersebut disampaikan Pengawas Sekolah Kecamatan Sepatan Timur, Cecep Saripudin, S.Pd., saat ditemui awak media Jaya Pos, Senin (2/11/2026).

Menurut Cecep, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Fasilitas sekolah yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi peserta didik, tetapi juga membantu para tenaga pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara optimal.

"Secara umum, kondisi sarana dan prasarana di sekitar 26 sekolah yang berada dalam wilayah pengawasan kami sudah cukup baik. Namun, tentu pemeliharaan dan peningkatan fasilitas harus terus dilakukan agar kegiatan belajar mengajar berjalan semakin maksimal," ujarnya.



Cecep Saripudin, Spd Pengawas SD di wilayah Kecamatam Sepatan Timur Tangerang Banten. (Foto/Abd)

Salah satu sekolah yang saat ini tengah mendapatkan perhatian dalam peningkatan fasilitas pendidikan adalah SD Negeri Kampung Kelor 1. Sekolah tersebut sedang menjalani proses rehabilitasi total bangunan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan kelayakan sarana pendidikan.

Rehabilitasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan representatif bagi para siswa maupun tenaga pendidik.

Selain memantau kondisi fasilitas sekolah, Cecep juga menjelaskan bahwa koordinasi dengan para kepala sekolah terus dilakukan secara berkala. Salah satunya melalui rapat awal bulan yang dihadiri para kepala sekolah se-Kecamatan Sepatan Timur.

Pertemuan tersebut menjadi sarana komunikasi dan evaluasi untuk membahas berbagai program pendidikan, perkembangan kegiatan sekolah, serta kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Cecep juga menyampaikan agenda rapat pada Rabu (4/11/2026) yang membahas perencanaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, perencanaan anggaran BOS perlu dilakukan secara cermat dan terukur agar penggunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah serta mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Melalui koordinasi dan perencanaan yang baik, diharapkan pengelolaan dana BOS dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cecep berharap sinergi antara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik terus diperkuat. Dengan demikian, berbagai persoalan dan kebutuhan pendidikan dapat diidentifikasi serta ditangani secara bersama-sama.

Ia menegaskan, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada kualitas tenaga pendidik dan proses pembelajaran, tetapi juga harus didukung fasilitas sekolah yang layak serta pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.

Dengan kondisi sarana dan prasarana yang semakin baik, disertai koordinasi yang berkesinambungan, kualitas pelayanan pendidikan di Kecamatan Sepatan Timur diharapkan terus meningkat demi menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa.

(Abd)

Peduli Ekonomi Warga, Kades Karet Mudi Berikan Bantuan Tempat Usaha Kopi Lengkap dengan Perlengkapannya

Tangerang Jaya Pos

Kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat kembali ditunjukkan Kepala Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Mudi. Bersama istrinya, Mudi memberikan bantuan berupa tempat usaha berjualan kopi lengkap dengan perlengkapan dan sejumlah barang dagangan kepada warga yang membutuhkan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi modal awal bagi penerimanya untuk membuka usaha kecil secara mandiri sekaligus memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapun bantuan yang diberikan meliputi tempat berjualan, persediaan kopi, susu, serta termos air panas dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha warung kopi sederhana.

Saat ditemui awak media Jaya Pos, Selasa (3/11/2026), Mudi mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keinginannya untuk membantu masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

"Semoga bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi penerimanya. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Dengan niat tulus, saya bersama istri berinisiatif memberikan tempat usaha beserta perlengkapan dagangannya. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi penerima bantuan," ujar Mudi.



Mudi, Kepala Desa Karet dalam rangka penyerahan bantuan berupa tempat dagang beserta isi dagangannya. (Foto/Abd)

Menurutnya, membantu sesama tidak harus selalu dalam bentuk materi atau uang tunai. Memberikan sarana usaha yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nafkah juga merupakan salah satu bentuk kepedulian yang memiliki manfaat jangka panjang.

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi benar-benar dikelola dan dikembangkan menjadi usaha produktif yang dapat menopang perekonomian keluarga.

Mudi juga berharap penerima bantuan memiliki semangat dan kemauan untuk menjalankan usaha dengan tekun, sehingga peluang usaha yang telah diberikan dapat berkembang dan memberikan hasil yang berkelanjutan.

Kepedulian seperti ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk turut mengambil bagian dalam membantu masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dorongan untuk bangkit dan membangun kemandirian ekonomi.

Melalui bantuan tempat usaha kopi tersebut, Mudi berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kesempatan untuk berusaha, menciptakan penghasilan sendiri, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

(Abd)

Perwakilan Sumatera Utara: Rikkot Manik (Kepala), Ir Rudy Limbong MT (Wakil), Isnani, Lenon Radot Tampubolon, Erwinsa Sinaga, Hunter Dominikus Samosir | **Biro Medan:** | **Biro Binjai:** Siti Fatimah Hasibuan (Kepala) | **Biro Langkat:** Abdul Rahman (Kepala) | **Biro Deli Serdang:** Horasman Limbong (Kepala), Rahmadani | **Biro Simalungun/P. Siantar:** Jhon Edward Sargih SH (Kepala), Ramlan Sirait | **Biro Labuhanbatu/Labusel:** Gatti H Tumanggor (Kepala) **Biro Belitung/ Belitung Timur:** Yustami Al (Kepala) | **Biro Padang Panjang:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Bukittinggi :** Zakirman (Kepala), Denny Alinur || **Biro Way Kanan:** Suhaili (Kepala) | **Perwakilan Banten:** | **Biro Padeglang:** Sofyandri | **Biro Kabupaten Tangerang:** Guntur Sihombing (Kepala), Abdullah Muhadi | **Biro Tangerang Selatan:** Ferry Dwi Darmawan (Kepala) | **Perwakilan Jawa Barat:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Bekasi:** Sabar Sinaga (Kepala) | **Biro Kabupaten Sukabumi:** Yudi Suyudi (Kepala) | **Biro Kab Bandung:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Ciamis/Pengandaran/Banjar:** Mamay (Kepala) | **Biro Garut:** Hartono (Kepala) | **Biro Pekalongan:** M Sofii (Kepala) | **Biro Kab Mojokerto :** Nur As'adi (Kepala), Buaji | **Biro Trenggalek:** Heru Wijaya SPd (Kepala) | **Biro Sidoarjo:** Wiro Utomo (Kepala) | **Biro Pasuruan: Wiro Utomo** (Kepala) | **Perwakilan Kalimantan Barat :** Suhardi | **Perwakilan Kalimantan Tengah:** Mandau Suwandi (Kepala), Yuel | **Biro Tolitoli:** Hariyanti (Kepala) | **Perwakilan Sulawesi Selatan:** Muh Hakim (Kepala)

Wakapolres Simalungun Kumpul Bersama Warga ..... *Halaman 7*

Purba, tokoh agama Jamesdin Damanik dan Moses Pasaribu, para kepala lingkungan, serta perwakilan masyarakat Kecamatan Raya.

Dalam sambutannya, Wakapolres menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pelaksanaan arahan Kapolri melalui program Quick Wins, khususnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). "Polres Simalungun hadir untuk mendengar langsung aspirasi warga. Kami mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban, tidak melakukan tindakan yang dapat memicu masalah hukum, serta tidak mencoba-coba narkoba," ujar KOMPOL Imam Alriyuddin.

Ia juga mengingatkan warga untuk memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 yang gratis dan beroperasi 24 jam, serta layanan WhatsApp "Halo Pak Kapolres Simalungun" di nomor +62 811-6501-516 untuk menyampaikan pengaduan, kritik, saran, maupun informasi. "Pesan yang masuk akan segera kami tindak lanjuti," ungkapnya.

Dalam sesi diskusi, Pardi Purba menanyakan mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Nagori Purba. Wakapolres menjelaskan, warga dapat datang langsung ke Polres Simalungun untuk berkonsultasi atau membuat laporan polisi agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Warga lain, N. Saragih, menyampaikan keluhan masih maraknya pencurian peralatan rumah tangga dan hasil pertanian, peredaran narkoba, serta perjudian daring maupun konvensional. Ia berharap kehadiran personel dan patroli ditingkatkan, termasuk pendekatan kepada warga yang masih berkeliaran lewat tengah malam. Ia juga mengusulkan interaksi langsung seperti ngopi atau sarapan bersama warga, serta imbauan kepada pemilik rumah kos agar membatasi jam kunjungan.

Menanggapi hal itu, Wakapolres berterima kasih dan menyebut masukan tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia mengakui keterbatasan jumlah personel dalam menjangkau seluruh wilayah Simalungun. "Terkait narkoba, seluruh jajaran diperintahkan terus memberantasnya. Pencegahan harus dimulai sejak dini, terutama kepada pelajar," ucapnya. Ia juga mengajak warga memasang CCTV di rumah dan tempat usaha untuk membantu pengungkapan kasus.

Kasat Binmas AKP Dorlan Pasaribu mengajak warga mengaktifkan Pos Kamling, memperkuat pengawasan orang tua terhadap anak, serta menolak perjudian daring. "Mulai dari diri sendiri, jangan mudah tergiur atau penasaran mencoba judi daring," katanya.

Helman Saragih, Ketua Pemuda Pancasila Pematang Raya, meminta penertiban knalpot brong dan menyoroti pengrusakan kios serta pencurian di Pasar Modern Pematang Raya. Kapolsek Raya AKP Oloan Sijabat menyebut razia knalpot brong pada malam Minggu telah dilakukan, namun sebagian orang tua masih kurang mendukung. Ia meminta tokoh masyarakat ikut mengimbau. Terkait kasus pasar, ia menyatakan belum menerima laporan polisi maupun informasi spesifik, sehingga meminta warga aktif melapor.

Tokoh agama Moses Pasaribu mengusulkan pendekatan sosial dan persuasif kepada individu yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Kasat Binmas menjawab bahwa Polres bersama BNN dan pemerintah daerah tengah membentuk desa atau kawasan bersih narkoba sebagai percontohan.

Sekjen PACS Charles Purba mengusulkan tes urine bagi siswa SMP dan SMA di Kecamatan Raya. Wakapolres menyatakan usulan itu perlu dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun untuk SMP dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk SMA.

Lurah Pematang Raya menyampaikan apresiasi dan kesiapan mendukung program kepolisian, serta berharap intensitas kegiatan preventif dan jumlah personel Bhabinkamtibmas di Kecamatan Raya ditambah.

Melalui kegiatan ini, Polres Simalungun menegaskan komitmennya hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung keluhan warga, dan menjaga Kamtibmas melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat. **(R.d)**

Sekko Jaktim Dukung Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon ..... *Halaman 7*

watnya di lingkungan Waduk Dukuh ini," kata Eka.

Sementara itu, Ketua RW 03 Kelurahan Dukuh, Irman Riyadi, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada ISPI dan jajaran pemerintah atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya warga RW 03.

Ia menegaskan, warga bersama pengurus Kelompok Tani (Poktan) siap terlibat aktif dalam merawat dan menjaga keberlangsungan tanaman yang telah disiapkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

"Kami sungguh berterima kasih kepada pimpinan dari para Himpunan Sarjana Pertanian ini dan juga para staf ketiga angkatan, serta juga kepada jajaran pemerintahan. Mudah-mudahan tanaman yang ada di Waduk Dukuh ini bisa kita tanam, bisa kita rawat, dan hasilnya bisa untuk warga seluruh terutama RW 03," ungkapnya.

Untuk memastikan keberlanjutan program, pengurus Poktan Anggrek bersama kelompok tani dari RW lainnya telah dikoordinasikan untuk terlibat dalam pemeliharaan tanaman. Kegiatan tersebut mencakup penyiraman, perawatan rutin, hingga pengelolaan hasil panen.

Melalui kolaborasi pemerintah, ISPI, kelompok tani, dan masyarakat, gerakan ini diharapkan tidak hanya memperluas penghijauan di kawasan permukiman, tetapi juga mendorong kemandirian pangan serta memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.

(Jiston)

DPP Topan-RI soroti Penggunaan ..... *Halaman 7*

Pendidikan DPP TOPAN-RI, terdapat sejumlah pos belanja fisik dan pengadaan barang pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 yang dinilai masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Beberapa di antaranya meliputi harga satuan material bangunan, pengadaan perangkat teknologi informasi (IT), serta fasilitas penunjang kegiatan sekolah.

DPP TOPAN-RI meminta pihak sekolah menyertakan dokumen pembanding harga atau market price survey untuk memastikan kewajaran nilai pengadaan tersebut.

Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana publik yang bersumber dari APBN maupun APBD harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DPP TOPAN-RI juga menyoroti pentingnya mencegah potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam proses penunjukan penyedia barang dan jasa.

Sebagai tindak lanjut, DPP TOPAN-RI telah mengirimkan surat tanggapan dan evaluasi lanjutan kepada pihak sekolah.

Melalui surat tersebut, organisasi ini meminta agar SMAN 90 Jakarta memberikan akses terhadap sejumlah dokumen pendukung, di antaranya Berita Acara Serah Terima (BAST), rekapitulasi penawaran dari tiga vendor, serta bukti pemenuhan kewajiban perpajakan berupa PPN dan PPh.

Sumondang menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan tersebut.

Menurutnya, apabila seluruh dokumen dapat diperlihatkan dan diverifikasi secara transparan, persoalan yang berkembang di tengah masyarakat diharapkan dapat diselesaikan dengan baik.

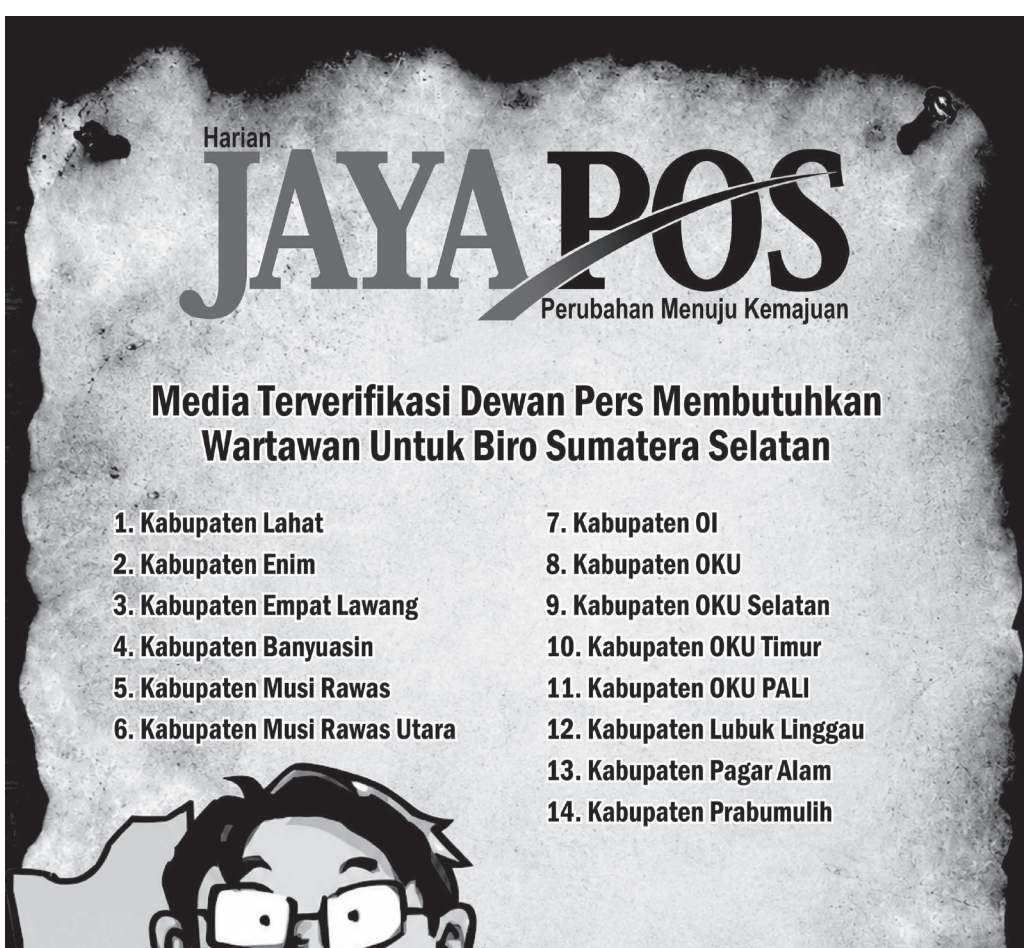
Namun, jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau pelanggaran prosedur, DPP TOPAN-RI menyatakan siap meneruskan persoalan tersebut kepada lembaga berwenang.

Lembaga yang dimaksud antara lain Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Aparat Penegak Hukum (APH).

Hingga berita ini ditulis, pihak SMAN 90 Jakarta belum memberikan keterangan lanjutan terkait permintaan dokumen pendukung dan evaluasi penggunaan anggaran tersebut.

Redaksi masih berupaya menghubungi pihak sekolah maupun Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperoleh penjelasan dan tanggapan resmi guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

(MJM)



Lantik 15 Pangulu dan 93 Anggota ..... *Halaman 7*

Raya, Sumatera Utara, Rabu (4/11/2026).

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan naskah pelantikan, dilanjutkan pengambilan sumpah dan janji jabatan oleh Bupati Simalungun. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara sumpah dan janji jabatan oleh perwakilan Pangulu serta Anggota Maujana Nagori, sekaligus penyematan tanda jabatan kepada Pangulu yang dilantik.

Bertindak sebagai saksi dalam prosesi tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Mudahalam Purba, serta Asisten Pemerintahan dan Kesra, Albert R. Saragih. Pengambilan sumpah juga disaksikan rohaniwan dari agama Islam, Kristen, dan Katolik.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/147/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Antarwaktu dan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/109/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Keanggotaan Maujana Nagori Tahun 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN) Kabupaten Simalungun, Elyanto Purba, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian proses Pemilihan Pangulu Antarwaktu dan pengisian keanggotaan Maujana Nagori Tahun 2026.

Dengan telah dilantiknya para Pangulu dan Anggota Maujana Nagori, diharapkan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kemasyarakatan di masing-masing nagori dapat segera berjalan secara optimal.

Dalam sambutannya, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Pangulu dan Anggota Maujana Nagori yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan penuh komitmen.

Menurut Bupati, para Pangulu yang baru dilantik memiliki tugas untuk melanjutkan kepemimpinan dan program pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya, sekaligus memastikan pembangunan di nagori masing-masing terus mengalami kemajuan.

Bupati secara khusus menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis antara Pangulu dan Maujana Nagori. Keduanya harus saling mendukung, menjaga komunikasi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

"Pangulu dan Maujana Nagori harus bekerja sama dan berjalan sejalan. Apabila tidak bersinergi, maka masyarakat yang menjadi korban," tegas Bupati.

Ia juga mengingatkan agar Pangulu mampu menjadi figur orang tua bagi seluruh masyarakat di nagorinya. Seorang pemimpin, menurutnya, harus hadir dan mudah ditemui warga, tidak membeda-bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan, serta mampu memahami berbagai persoalan yang dihadapi warganya.

Perhatian khusus juga diminta diberikan kepada masyarakat kurang mampu, lanjut usia (lansia), warga yang sedang menderita sakit, serta upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Bupati menegaskan, keberhasilan pembangunan nagori tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah nagori mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.

Selain itu, Bupati mengajak seluruh Pangulu untuk kembali menggelorakan semangat gotong royong sebagai kekuatan utama dalam membangun nagori. Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Dalam pengelolaan pemerintahan, ia juga mengingatkan agar para Pangulu senantiasa mengelola keuangan nagori secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan anggaran harus direncanakan dengan baik, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, koordinasi dengan Maujana Nagori dan seluruh unsur terkait harus terus ditingkatkan.

"Pangulu harus dapat bekerja sama dengan Maujana Nagori dan seluruh masyarakat di nagori untuk bergotong royong memajukan nagori masing-masing," ajak Bupati.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa sinergi antara pemerintah nagori, Maujana Nagori, dan masyarakat merupakan modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Acara pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan bersalaman antara Bupati Simalungun, jajaran Forkopimda, serta para pejabat yang hadir dengan Pangulu dan Anggota Maujana Nagori yang baru dilantik. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, Kasdim 0207/Simalungun Mayor Inf. Prawoto, Kajari Simalungun Munawal Hadi, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, jajaran pimpinan perangkat daerah, para Camat se-Kabupaten Simalungun, serta keluarga Pangulu yang dilantik.

(Rd)

DPRD Kabupaten Pasuruan Manfaatkan ..... *Halaman 7*

dalam kondisi fisik prima saat menjalankan tugas negara.

RSUD Bangil menyajikan layanan kesehatan kelas wahid yang dirancang secara menyeluruh guna mendeteksi kondisi tubuh sejak dini. Dalam agenda rutin tahun ini, para anggota dewan menjalani berbagai rangkaian pemeriksaan canggi.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya program pemeriksaan rutin ini. Menurutnya, padatnya kegiatan legislatif menuntut kewaspadaan tinggi terhadap kesehatan pribadi.

"Ini adalah ikhtiar bersama agar dewan bisa terus menampung aspirasi dan suara rakyat tanpa terkendala masalah kesehatan. Dengan mengetahui kondisi tubuh sejak dini, kita dapat lebih waspada dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan agar gangguan kesehatan tidak menjadi parah," ujar Samsul.

Tidak hanya sukses memuaskan para anggota legislatif, kualitas pelayanan yang ramah dan kecepatan sistem administrasi RSUD Bangil menuai pujian langsung dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, M. Zaini.

Melihat kelengkapan fasilitas medis mutakhir dan kenyamanan yang ditawarkan rumah sakit milik pemerintah daerah ini, M. Zaini turut mendorong sektor swasta dan korporasi di wilayah Pasuruan untuk mempercayakan kesehatan karyawannya ke RSUD Bangil.

RSUD Bangil membuktikan diri bukan sekadar rumah sakit daerah, melainkan mitra kesehatan strategis yang siap melayani kebutuhan Medical Check Up (MCU) bagi instansi pemerintahan, perusahaan swasta, hingga masyarakat umum dengan standar pelayanan prima dan profesional. **(Wio)**

PMII Kota Banjar Geruduk Kemenag ..... *Halaman 7*

membuka alokasi anggaran operasional perjalanan dinas, monitoring, dan visitasi tim penilai PKKM.

Sanksi Copot Jabatan dengan pelaksanaan sanksi disiplin berat hingga pencopotan bagi oknum pengawas atau pejabat Kemenag yang terbukti memeras fasilitas ilegal. Pakta Integritas Darurat dengan menerbitkan Surat Edaran resmi larangan gratifikasi dan kewajiban penandatanganan pakta integritas bebas pungli sebelum tim turun ke lapangan.

Jaminan Perlindungan Hukum dengan memberikan garansi keamanan operasional serta perlindungan pencairan dana BOS/insentif bagi madrasah yang berani bersuara membongkar intimidasi birokrasi. Serta mengevaluasi total kepemimpinan dengan menilai Kepala Kemenag Kota Banjar gagal mengawasi internal dan mendesak evaluasi kelayakan jabatannya. "Jika tuntutan ini diabaikan di tingkat kota, PMII dipastikan akan membawa dan mengawal kasus ini hingga ke tingkat Provinsi bahkan pusat," ancam Joni.

Menanggapi gelombang desakan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus, turun tangan meladeni aspirasi para mahasiswa. Fikri menegaskan kembali prinsip dasar layanan di lembaga keagamaan yang dipimpinnya. "Seluruh layanan di Kementerian Agama itu gratis, nol rupiah, dan tidak menjadi beban masyarakat. Kecuali untuk pernikahan di luar KUA yang mekanismenya resmi disetor ke kas negara sebagai PNBP sebesar Rp600.000," terang Fikri.

Fikri menunjukkan dokumen Maklumat Pelayanan serta Surat Keputusan Pencegahan Pungli dan Gratifikasi yang diterbitkannya sejak Oktober 2024 sebagai langkah preventif awal kepemimpinannya.

Kendati demikian, ia menyambut hangat kontrol sosial yang dilayangkan PMII. Ditegaskannya, terkait dugaan tersebut, prinsip yang diterapkan pihaknya adalah tabayyun. "Kita akan bentuk tim untuk melakukan konfirmasi dan investigasi mendalam apakah dugaan tersebut terbukti di lapangan. Jika terbukti ada oknum ASN yang bermain, sanksi tegas sesuai aturan PP dan undang-undang yang berlaku pasti dijatuhkan," tegas Fikri.

Aksi audiens dan tekanan mahasiswa hari ini menandai permulaan ujian transparansi bagi birokrasi Kemenag Kota Banjar. Publik kini menanti, akankah investigasi internal ini berujung pada pembersihan total, atau sekadar formalitas peredam emosi di atas kertas. PMII memastikan, pengawalan tak akan kendur hingga keadilan bagi madrasah benar-benar ditegakkan.

(Mamay)

Kades Muncung Bantah Menjual Lahan Seluas 68.000 M2 Kepada PIK-2


Dari kiri rombongan Kades Muncung Agus Purwadi, Camat Kronjo M. Mumu Mukhlis (kursi utama), Kadis DPMPD Kab. Tangerang Yayat Rohiman, team wartawan dan team LAI-BPAN saat Audensi. (Foto/Guns)

Tangerang, Jaya Pos

Menindaklanjuti pemberitaan JAPO. CO, Jumat(30/10-2026) tentang Kades Muncung diduga menjual Lahan 68.000M2 milik Asiykin dan milik Negara. Dalam Audensi antara Lembaga Aliansi Indonesia- Badan Pengawasan Aset Negara (LAI-BPAN) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Kades Muncung Agus Purwadi SE memberikan bantahan tidak pernah menjual Lahan kepada PIK-2 Rabu(4/11-2026) bertempat di aula gedung DPMPD Tigaraksa.

Audensi dihadiri Kadis DPMPD Kab. Tangerang H Yayat Rohiman, S.IP., M.Si didampingi jajaran, Camat Kronjo Muhammad Mumu Mukhlis, S. STP., M. Si, Kades Muncung Agus Purwadi SE didampingi jajaran, dan team dari LAI-BPAN DPD Banten. Peliputan oleh 3(tiga) Media, Harapan Rakyat, Jayapos group dan Kisi-kisi. Audensi dibuka langsung oleh Kadis DPMPD Kab. Tangerang.

Dalam audensi Kades Muncung membantah tidak pernah menjual lahan milik Asyikin dan milik Negara kepada pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) -2. Dan menantang para pihak yang mensengketakan untuk menunjukkan bukti, atau menempuh jalur Hukum untuk mencari kebenaran. Pernyataan Kades tersebut sekaligus menjawab pertanyaan dari team LAI-BPAN dan wartawan .

“ Saya sebagai Kepala Desa Muncung menjelaskan, bahwa saya tidak pernah menjual tanah milik Asiykin dan lahan garis sepadan sungai sebagai milik Negara kepada PIK-2. Kalau ada bukti, bahwa saya menjual tanah atau menerima pembayaran atas penjualan tanah tersebut. Saya bersedia menerima sanksi hukumnya, “ jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, bahwa Asiykin pernah bertemu dengan Kades untuk membahas permasalahan tersebut. Namun pertemuan tersebut tidak ada kesimpulan, karena Asikyn tidak bisa menunjukkan dokumen atau data yang merujuk lahan yang diklaim miliknya (warisan). Surat Leter’C’ yang tunjukkan adalah di desa Padaleman, sedang lahan yang diklaim berada di desa Muncung.

“ Saya sudah pernah bertemu dengan Asiykin membahas lahan tersebut. Asiykin menunjukan Surat Leter”C” desa Padaleman, sedangkan letak tanah yang diklaim beada di desa Muncung. Saya mengira setelah pertemuan Asiykin telah memahami dan menerima penjelasan dari saya. Ternyata masih lanjut dipermasalahkan,” keluh Agus.

Lanjut Agus, sebenarnya permasalahan ini akibat proyek pelebaran dan pelurusan aliran sungai tahun 1983. Aliran sungai yang sebelumnya agak sempit dan berbelok-belok di rubah menjadi lebar dan agak lurus. Akibatnya sebelumnya tanah darat berubah menjadi aliran sungai dan pergeseran aliran sungai bergeser ke wilayah desa Pademanan.

“Saya juga berasumsi terkait adanya proyek renovasi aliran sungai tahun 1983, bisa menimbulkan perubahan letak aliran sungai dan tanah darat.

Kemungkinan tanah darat atau tambak yang diklaim sepertinya sudah berubah letaknya. i. Dan coba tuntut ganti-rugi kepada pelaksana proyek tersebut, “kata Agus.

Kadis DPMPD Yayat Rohiman menegaskan, bahwa audensi ini dilaksanakan bukan untuk mencari atau menentukan benar dan salah. Hanya bertujuan untuk memberikan dan mendapatkan penjelasan sekaligus menjalin silaturahim. Memang lahan garis sepadan sungai sebagai aset Negara tidak boleh dijual.

Saya berharap pertemuan ini bukan untuk dijadikan penentuan benar atau salah. Audensi hanya sebatas penjelasan saja sekaligus kita bisa mengikat tali silaturahim antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga dan wartawan. Lahan garis sepadan sungai yang menjadi aset Negara tidak boleh dijual, “tegas Yayat.

Lanjut Yayat, Kebenarannya bisa ditentukan melalui jalur Hukum atau penegakan Hukum. Berharap semua cepat selesai dengan baik dan terang-benderang serta penjelasan Kades Muncung juga bisa dipertanggungjawabkan. Namun kepada pihak yang merasa dirugikan dan sudah melaporkan kepada Penegak Hukum tetap dihormati.

Bagi pihak yang merasa dirugikan dan sudah melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), saya menghormati dan tidak ikut campur. Kita biarkan proses Hukum berjalan, dan saya juga berharap penjelasan dan pernyataan Kades Muncung bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, “ Pungkasnya.

Sekretaris LAI-BPAN A. Rozak menanggapi penjelasan Kades Muncung. Dengan adanya perubahan letak aliran sungai ke wilayah kecamatan-Tanara, tidak menutup kemungkinan lahan yang dimiliki Asyikin menjadi masuk ke wilayah Kronjo. Surat alas hak baik berupa Leter ‘C’ atau Girik yang sebelumnya terdaftar di desa Padaleman ; kecamatan Tanara seharusnya tidak jadi masalah. Hanya memastikan letak lahan yang sebenarnya setelah adanya renovasi sungai.

“ Menurut saya yang perlu dipastikan adalah letak tanah sebelum dan sesudah renovasi aliran sungai. Terkait data atau alas hak yang dimiliki ahli waris disesuaikan dengan perkembangan pemekaran wilayah. Jangan dijadikan pencatatan wilayah jadi dasar pembenaran, “tegas Rozak.

Jayapos group sebagai Media yang dari awal mengikuti investigasi dan peliputan akan mengawal permasalahan ini sampai tuntas. Dalam proses Hukum juga akan mengawal dengan ketat, demi keadilan bagi masing-masing pihak yang bersengketa.

(GUNS)

Operasi Patuh Krakatau 2026, Satlantas Polres Way Kanan Edukasi Pelajar SMKN Blambangan Umpu

Way Kanan, Jaya Pos

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Way Kanan menggelar penyuluhan keselamatan berlalu lintas di SMKN Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Jumat (30/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Patuh Krakatau 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas, khususnya di kalangan pelajar.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) mengenai etika berlalu lintas sekaligus membagikan brosur berisi imbauan keselamatan kepada para siswa.


Ops Patuh Krakatau 2026 Satlantas Polres Way Kanan Sambagi Sekolah,Bagikan Brosur dan Edukasi Pelajar. (Humas Polri)

Kegiatan dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Way Kanan AKP Rudy Apriansyah Unyi, S.H., didampingi Kanit Kamsel AIPTU Gusti serta anggota Satlantas Brigpol Annisa dan Bripda M. Ananda.Para pelajar diberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara, serta menghormati sesama pengguna jalan.

Petugas juga mengajak para siswa membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Edukasi tersebut diharapkan tidak sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, baik sebagai pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Kasat Lantas Polres Way Kanan AKP Rudy Apriansyah Unyi mengatakan, penyuluhan ke sekolah merupakan langkah preemtif kepolisian untuk menanamkan kesadaran keselamatan dan membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda.

Menurutnya, keselamatan di jalan raya bukan hanya tanggung jawab kepolisian, melainkan seluruh pengguna jalan. Karena itu, setiap individu harus disiplin mematuhi aturan, menghargai pengguna jalan lain, serta mengutamakan keselamatan daripada kecepatan.

Melalui Operasi Patuh Krakatau 2026, Satlantas Polres Way Kanan berharap kesadaran berlalu lintas semakin tumb buh di kalangan pelajar sehingga dapat menekan risiko kecelakaan dan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. **(Suhaili)**

Ratusan Kunang-Kunang Terangi Refleksi Spiritual PWI Jaya di Gunung Padang

Cianjur, Jaya Pos

Senja perlahan turun di kawasan situs megalitikum Gunung Padang, Selasa (3/11/2026). Di antara bebatuan purba yang berdiri kokoh di Teras 5, puluhan wartawan, prajurit TNI, dan komunitas pencinta Gunung Padang berkumpul dalam suasana hening. Mereka datang bukan sekadar menikmati keindahan situs bersejarah, melainkan memperingati Hari Kerohanian Nasional melalui doa, refleksi, dan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta.

Ada pemandangan yang membuat malam itu terasa istimewa. Ketika refleksi Hari Kerohanian Nasional dipimpin Bendahara PWI Jaya, Dar Edi Yoga, ratusan kunang-kunang tampak berkelip di sekitar Teras 5. Cahaya kecil yang muncul di antara pepohonan dan bebatuan purba seolah menjadi hiasan alami yang menyertai suasana perenungan.

Bagi peserta yang menyaksikannya, kehadiran kunang-kunang tersebut menjadi pengalaman yang mengesankan. Di tengah keheningan alam, kerlip cahaya itu menghadirkan nuansa magis dan mengingatkan bahwa keindahan ciptaan Tuhan sering hadir melalui hal-hal sederhana.

Rombongan PWI Jaya dipimpin Ketua Kesit B. Handoyo, didampingi Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Tubagus Adhi, Sekretaris Arman Suparman, serta Bendahara Dar Edi Yoga. Hadir pula puluhan wartawan dan sejumlah anggota komunitas pencinta Gunung Padang.


Puluhan wartawan, prajurit TNI, dan komunitas pencinta Gunung Padang berkumpul dalam suasana hening.(Foto yoga)

Di antara rombongan terdapat undangan istimewa, Brigjen TNI Cosmas Danga Manukallo. Menariknya, bagi Kesit maupun Cosmas, kunjungan tersebut merupakan pengalaman pertama menapaki situs megalitikum yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Perjalanan menuju kawasan punden berundak dilakukan dengan menapaki tangga demi tangga, melewati Teras 1 hingga Teras 5. Rombongan didampingi Kepala Juru Pelihara Gunung Padang, Nanang Sukmana, serta praktisi spiritual Cahaya Adi Wibowo.

Di Teras 5, Dar Edi Yoga memimpin refleksi Hari Kerohanian Nasional. Ia mengajak seluruh peserta berhenti sejenak dari kesibukan, membuka hati, dan menyadari bahwa kehidupan bukan semata-mata tentang jabatan, kekuasaan, maupun pencapaian duniawi.

Kerohanian merupakan perjalanan manusia untuk mengenali dirinya, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk belajar menghormati dan mengasihi.

Suasana alam turut memberikan pengalaman tersendiri. Awan mendung sempat menyelimuti kawasan Gunung Padang dan rintik hujan sempat turun. Namun, hujan berhenti ketika prosesi perjalanan dan refleksi berlangsung dari Teras 1 hingga Teras 5. Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, yang baru pertama kali mengunjungi Gunung Padang, mengaku mendapatkan pengalaman yang memberikan ruang untuk merenung.

Sementara itu, Brigjen TNI Cosmas Danga Manukallo mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan lintas komunitas seperti ini patut didukung, terlebih karena membawa pesan persatuan dan kepedulian terhadap bangsa.

Cosmas berharap doa bersama menjadi bagian dari ikhtiar batin agar Indonesia senantiasa dijauhkan dari bencana, perpecahan, serta berbagai persoalan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagi jenderal bintang satu ini, kebersamaan dalam doa menjadi pengingat bahwa menjaga Indonesia bukan hanya melalui pengabdian dan tugas formal, tetapi juga melalui kepedulian, persaudaraan, dan semangat saling menghormati.

Suasana kekeluargaan semakin terasa ketika seluruh peserta menikmati santap bersama. Seekor domba putih diolah menjadi sate dan sop untuk disantap bersama. Hidangan tersebut menjadi bagian dari kebersamaan yang mempertemukan wartawan, prajurit TNI, dan komunitas pencinta Gunung Padang tanpa sekat jabatan maupun latar belakang. Malam itu, Gunung Padang meninggalkan kenangan tersendiri. **(Red)**

Berkat Program TMMD ke-130
Maspuah Kini Bisa Bernapas Lega


Maspuah berterima kasih kepada pihak pemerintah dan TNI karena rumahnya sekarang menjadi permanen (Foto:Mamay)

Pangandaran, Jaya Pos

Rasa takut yang selama 23 tahun menghantui Maspuah (59), seorang janda warga Dusun Limusnunggal, Desa Bangunjaya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, perlahan berganti menjadi kebahagiaan. Rumah panggung berdinding bilik bambu yang selama ini nyaris roboh dan kerap bocor saat hujan, kini mulai dibangun kembali menjadi rumah permanen melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130.

Selama lebih dari dua dekade, Maspuah harus bertahan hidup di rumah semi permanen dengan konstruksi kayu yang kondisinya semakin lapuk. Atap rumah kerap bocor ketika hujan turun, sementara sejumlah bagian bangunan mulai rapuh dan membahayakan keselamatannya.

Kondisi tersebut membuat Maspuah selalu diliputi kekhawatiran, terutama saat hujan deras, angin kencang hingga terjadi gempa bumi. “Kalau hujan takut kehujanan, takut ada gempa dan angin kencang. Dulu sempat ada kayu yang roboh, saya hanya bisa pasrah,” ungkap Maspuah, Rabu (4/11).

Ia menceritakan, rumah panggung tersebut awalnya dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat setelah suaminya meninggal dunia. Warga saat itu berinisiatif membantu menyediakan tempat tinggal bagi dirinya. “Dulu punya rumah juga dibikinkan masyarakat di sini. Setelah ditinggal suami, langsung dibikinkan rumah panggung dari kayu dan bilik bambu,” jelasnya.

Maspuah mengaku, selama menempati rumah tersebut, dirinya bersama anak-anak beberapa kali berupaya memperbaiki bagian atap yang bocor. Namun, seiring bertambahnya usia bangunan, kerusakan justru semakin meluas.

Maspuah memiliki lima anak yang kini seluruhnya sudah berkeluarga. Dalam kesehariannya, ia lebih banyak mengurus anak dan kelima cucunya.

Kini, harapan untuk memiliki tempat tinggal yang lebih aman mulai terwujud. Rumah panggung yang sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan dibongkar dan dibangun kembali menjadi rumah permanen sederhana berukuran 5 x 6 meter.

Proses pembangunan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan personel TNI, Polri, masyarakat serta petugas terkait. Bangunan mulai menggunakan pasangan bata hebel, dilengkapi pengecoran pada bagian sudut dan struktur bangunan. Sejumlah balok kayu juga telah disiapkan untuk konstruksi atap.

Pengerjaan rumah tersebut telah berlangsung hampir dua pekan. Maspuah pun mengaku tidak sabar menunggu pembangunan selesai agar bisa segera menempati rumah barunya. “Alhamdulillah, senang sekali. Sekarang rumah saya dibangun permanen. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang sudah membantu membangun rumah saya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dusun Limusnunggal, Ragil Herwanda Kumbara, mengatakan terdapat dua rumah warga di wilayahnya yang mendapatkan bantuan pembangunan melalui program TMMD ke-130, yakni rumah milik Maspuah dan Abdul Sobar. Menurut Ragil, kedua warga tersebut memang sangat membutuhkan bantuan karena keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang sudah tidak layak huni.

Dijelaskannya, pengajuan bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) untuk kedua warga tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak 2024. Namun, bantuan baru dapat direalisasikan pada 2026 melalui program TMMD. Di sisi lain, Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TMMD, Brigjen TNI R. Benny Arifin, mengatakan kunjungannya bersama rombongan bertujuan memantau pelaksanaan program TMMD ke-130 di Kabupaten Pangandaran.

Monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan. **(Mamay)**